

BAB V. TEMUAN DAN PEMBAHASAN KOMPREHENSIF

5.1. Administrasi Data

Pengumpulan dan pengelolaan data merupakan langkah penting dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa data yang dianalisis bersifat akurat dan dapat dipercaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan model kepatuhan pajak restoran berbasis *e-commerce* GoFood di Kota Semarang. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah kuesioner yang disebarakan kepada pemilik platform *e-commerce* GoFood, sebagai pemilik restoran wajib pajak. Kuesioner ini dirancang untuk menggali informasi terkait tiga variabel utama, yaitu *e-commerce*, *self assessment system*, dan pengawasan pajak berbasis teknologi. Tujuan dari penggunaan kuesioner ini adalah untuk mengungkap kesenjangan antara pertumbuhan restoran *e-commerce* dan realisasi penerimaan pajaknya, serta memahami sejauh mana tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Data dikumpulkan selama dua bulan. Selama waktu ini, sebanyak 200 kuesioner disebarakan kepada pemilik restoran yang menggunakan *e-commerce* GoFood di Kota Semarang melalui email, platform online, dan juga secara langsung dengan bantuan enumerator yang telah dilatih.

Proses penyaringan terdiri dari pemeriksaan jawaban yang tidak konsisten dan kelengkapan data. Pengumpulan data dilakukan oleh enumerator, yaitu mahasiswa semester 5 dan 7 di Universitas Diponegoro. Sebelum pengumpulan data, enumerator mengikuti briefing untuk memahami

tujuan penelitian dan cara mengisi kuesioner. Tabel berikut menunjukkan ringkasan administrasi data yang telah dikumpulkan. Tabel ini mencantumkan jumlah kuesioner yang disebarkan, dikembalikan, dan status data yang valid.

Tabel 5. 1 Administrasi Data

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Penyebaran Kuesioner	200	100
Kuesioner yang Kembali	145	72.5
Kuesioner Tidak Dapat Diolah	77	38.5
Kuesioner Siap di Input	68	34
Data Valid	68	100

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Tabel 5.1 menunjukkan hasil dari pengumpulan dan validasi kuesioner dalam penelitian ini. Dari total 200 kuesioner yang disebarkan kepada pemilik restoran GoFood di Kota Semarang, sebesar 145 kuesioner yang kembali, 77 kuesioner tidak dapat diolah karena berbagai alasan sebagai berikut:

1. Beberapa responden ternyata bukan merupakan pemilik atau pengelola restoran yang terdaftar di platform GoFood, padahal penelitian ini secara khusus menargetkan pelaku usaha kuliner yang menggunakan layanan e-commerce GoFood.
2. Terdapat beberapa kuesioner yang diisi oleh individu atau restoran yang sama lebih dari satu kali.
3. Sejumlah kuesioner dikembalikan setelah waktu yang telah ditentukan dalam rencana pengumpulan data, sehingga tidak masuk dalam periode yang sudah ditetapkan dan tidak dapat disertakan dalam pengolahan.

4. Tidak lengkapnya pengisian kuesioner dan Kesalahan pengisian.

Dengan demikian, 68 kuesioner dianggap valid dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Persentase kuesioner yang valid dari total kuesioner yang disebarkan adalah 34%. Sebelum data dianalisis, dilakukan uji Non-Response Bias untuk melihat apakah terdapat perbedaan karakteristik antara responden yang memberikan kuesioner pada waktu yang berbeda. Uji ini bertujuan untuk memastikan apakah ada bias yang signifikan berdasarkan waktu pengembalian kuesioner. Jika nilai p pada uji Levene's Test $> 0,05$, maka asumsi homogenitas varians terpenuhi. Namun, jika nilai Sig. (2-tailed) $\leq 0,05$, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok responden.

Tabel 5. 2 Hasil Non-Response Bias

		<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>						
		<i>F</i>	<i>Sig.</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2- tailed)</i>	<i>Mean Difference</i>	<i>Std. Error Differe nce</i>	<i>95% Confidence Interval of the Difference</i>	
									<i>Lower</i>	<i>Upper</i>
EC	<i>Equal variances assumed</i>	40.843	.000	-3.729	66	.000	-1.07647	.28871	-1.65289	-.50005
	<i>Equal variances not assumed</i>			-3.729	55.742	.000	-1.07647	.28871	-1.65488	-.49806
SAS	<i>Equal variances assumed</i>	40.333	.000	-3.233	66	.002	-1.01103	.31269	-1.63533	-.38673
	<i>Equal variances not assumed</i>			-3.233	53.445	.002	-1.01103	.31269	-1.63808	-.38398
KP	<i>Equal variances assumed</i>	58.143	.000	-2.541	66	.013	-.81373	.32022	-1.45306	-.17440
	<i>Equal variances not assumed</i>			-2.541	49.660	.014	-.81373	.32022	-1.45701	-.17045
PPB T	<i>Equal variances assumed</i>	48.626	.000	-2.858	66	.006	-.87815	.30721	-1.49151	-.26479
	<i>Equal variances not assumed</i>			-2.858	51.248	.006	-.87815	.30721	-1.49482	-.26148

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Hasil analisis menggunakan Independent Sample T-Test menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, yaitu variabel EC (*E-Commerce*) sebesar 0,000, SAS (*Self Assessment System*) sebesar 0,002, KP (Kepatuhan Pajak) sebesar 0,014, dan PPBT (Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi) sebesar 0,006. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa data

bias signifikan.

5.2. Deskripsi Responden

5.2.1. Karakteristik Berdasarkan Alamat Restoran

Dalam penelitian ini, analisis karakteristik berdasarkan alamat restoran merupakan informasi mengenai distribusi geografis responden. Data ini membantu mengetahui bagaimana kepatuhan pajak dan penggunaan platform *e-commerce* GoFood bisa saja berbeda untuk berbagai wilayah. Tabel di bawah ini merangkum jumlah restoran yang terdaftar berdasarkan wilayah administratif yang berbeda.

Tabel 5. 3 Karakteristik Berdasarkan Alamat Restoran

Wilayah	Jumlah Restoran	Persentase (%)
Semarang Barat	10	14.7
Semarang Tengah	18	26.5
Semarang Selatan	6	8.8
Pedurungan	4	5.9
Gajahmungkur	1	1.5
Banyumanik	1	1.5
Semarang Timur	1	1.5
Mijen	3	4.4
Ngaliyan	1	1.5
Tembalang	3	4.4
Candisari	4	5.9
Gunungpati	1	1.5
<u>Total</u>	<u>68</u>	<u>100.0</u>

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Tabel 5.3 menunjukkan distribusi restoran berdasarkan lokasi kecamatan di Kota Semarang dari 68 kuesioner yang valid. Kecamatan Semarang Tengah memiliki jumlah restoran terbanyak dengan 18 restoran, yang berarti 26,5% dari total restoran yang diteliti berada di kecamatan ini. Kecamatan Semarang Barat memiliki 10 restoran, yang merupakan 14,7% dari total. Selanjutnya, Kecamatan Semarang Selatan memiliki 6 restoran, atau 8,8% dari total. Kecamatan Pedurungan memiliki 4 restoran, setara dengan 5,9% dari total restoran. Kecamatan Mijen dan Kecamatan Tembalang masing-masing memiliki 3 restoran, yang setara dengan 4,4% dari total restoran.

Kecamatan-kecamatan lainnya, seperti Gajahmungkur, Banyumanik, Semarang Timur, dan Ngaliyan, masing-masing memiliki 1 restoran, atau 1,5% dari total restoran. Secara keseluruhan, distribusi restoran di Kota Semarang menunjukkan bahwa sebagian besar restoran terkonsentrasi di Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Barat, sementara kecamatan lainnya memiliki jumlah restoran yang lebih sedikit.

5.2.2. Karakteristik Berdasarkan Kepemilikan NPWPD

Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan informasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan restoran terhadap peraturan perpajakan daerah dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi analisis kepatuhan pajak serta efektivitas kebijakan pajak restoran berbasis *e-commerce* GoFood di Kota Semarang. Tabel berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan kepemilikan NPWPD :

Tabel 5. 4 Karakteristik Berdasarkan Kepemilikan NPWPD

Kategori Kepemilikan NPWPD	Frekuensi	Persentase (%)
Memiliki NPWPD	68	100
Tidak Memiliki NPWPD	0	0
Total	68	100

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Dari tabel 5.4, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden, yaitu 68 restoran atau 100%, memiliki NPWPD. Kepemilikan NPWPD ini menunjukkan bahwa restoran-restoran tersebut telah terdaftar dan mematuhi kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku..

5.2.3. Karakteristik Berdasarkan Tahun Berdiri

Karakteristik berdasarkan tahun berdirinya restoran memberikan gambaran tentang usia dan pengalaman operasional restoran yang dapat mempengaruhi pola kepatuhan pajak dan strategi bisnis. Tabel berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan tahun berdiri restoran :

Tabel 5. 5 Karakteristik Berdasarkan Tahun Berdiri

Kategori Tahun Berdiri	Frekuensi	Persentase (%)
Sebelum 2010	10	14,7
2010 - 2015	19	27,9
2016 - 2020	24	35,3
Setelah 2020	15	22,1
Total	68	100

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan tabel 5.5, restoran responden terbagi menjadi beberapa

kategori berdasarkan tahun berdirinya. Sebagian besar restoran, yaitu 24 restoran atau 35,3%, berdiri antara tahun 2016 hingga 2020. Menunjukkan bahwa banyak restoran yang relatif baru dalam pasar *e-commerce* dan mungkin menghadapi tantangan berbeda dibandingkan restoran yang lebih lama berdiri. Selanjutnya, 19 restoran atau 27,9% berdiri antara tahun 2010 hingga 2015, sedangkan 15 restoran atau 22,1% berdiri setelah tahun 2020. Restoran ini merupakan restoran yang sangat baru dan mungkin belum sepenuhnya beradaptasi dengan teknologi dan sistem perpajakan. Terakhir, 10 restoran atau 14,7% didirikan sebelum tahun 2010. Kategori ini merupakan restoran-restoran yang lebih lama dan telah memiliki pengalaman dan sistem operasional yang lebih matang.

5.2.4. Karakteristik Berdasarkan Pajak yang Dikenakan

Karakteristik responden berdasarkan jenis pajak yang dikenakan pada restoran memberikan informasi mengenai jenis pajak yang dibayar oleh restoran hal ini dapat memberikan gambaran tentang perbedaan dalam kepatuhan pajak dan pengaruhnya terhadap manajemen pajak restoran. Tabel berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis pajak yang dikenakan:

Tabel 5. 6 Karakteristik Berdasarkan Pajak yang Dikenakan

Kategori Pajak	Frekuensi	Persentase (%)
Pajak Restoran	20	29,4
Pajak Hotel dan Restoran	25	36,8
Pajak Makanan dan Minuman	18	26,5
Pajak Lainnya	5	7,4
Total	68	100

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Dari tabel 5.6, dapat dilihat bahwa mayoritas restoran responden dikenakan pajak hotel dan restoran, dengan 25 restoran atau 36,8% termasuk dalam kategori ini. Pajak hotel dan restoran mencakup kombinasi pajak yang dikenakan pada sektor perhotelan dan restoran, yang mencerminkan jenis pajak yang lebih luas dan lebih kompleks. Sebanyak 20 restoran atau 29,4% dikenakan pajak restoran secara khusus. Pajak ini umumnya diterapkan langsung pada transaksi yang dilakukan di restoran, dan memiliki dampak langsung terhadap pengelolaan keuangan restoran. Kategori pajak makanan dan minuman dikenakan pada 18 restoran atau 26,5%. Pajak ini berlaku khusus untuk penjualan makanan dan minuman, dan dapat memberikan informasi penting mengenai pola konsumsi dan kepatuhan pajak pada jenis produk ini. Terakhir, 5 restoran atau 7,4% termasuk dalam kategori pajak lainnya, yang mencakup berbagai jenis pajak yang tidak termasuk dalam kategori utama seperti pajak hiburan atau pajak lainnya.

5.2.5. Karakteristik Berdasarkan Beban Pajak Rata-Rata Per Tahun

Karakteristik responden berdasarkan beban pajak rata-rata yang dibayar setiap tahun oleh restoran memberikan informasi untuk menilai dampak beban pajak terhadap kepatuhan dan manajemen pajak restoran di Kota Semarang. Tabel berikut menyajikan distribusi responden berdasarkan beban pajak rata-rata per tahun:

Tabel 5. 7 Karakteristik Berdasarkan Beban Pajak Rata-Rata Per Tahun

Kategori Beban Pajak	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang dari Rp 10.000.000	12	17.65%
Rp 10.000.000 - Rp 50.000.000	23	33.82%
Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000	15	22.06%
Lebih dari Rp 100.000.000	18	26.47%
Total	68	100

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Dari 5.7, terlihat bahwa beban pajak yang dikenakan pada sebagian besar restoran berada dalam kisaran Rp 10.000.000 hingga Rp 50.000.000 per tahun, dengan 23 restoran atau 33,82% termasuk dalam kategori ini. Beban pajak dalam kisaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar restoran mengalami beban pajak yang relatif moderat, yang dapat mempengaruhi strategi pengelolaan pajak restoran. Sebanyak 15 restoran atau 22,06% memiliki beban pajak rata-rata antara Rp 50.000.000 hingga Rp 100.000.000. Beban pajak dalam kisaran ini menunjukkan tekanan finansial yang lebih besar, yang mungkin memerlukan strategi kepatuhan pajak yang lebih cermat. Kategori beban pajak lebih dari Rp 100.000.000 terdapat 18 restoran atau 26,5% dari total responden. Restoran dalam kategori ini mengalami beban pajak yang signifikan, yang dapat berdampak pada perencanaan keuangan dan kepatuhan pajak mereka secara lebih intensif. Terakhir, terdapat 12 restoran atau 17,65% dengan beban pajak kurang dari Rp 10.000.000, menunjukkan bahwa sebagian kecil restoran mengalami beban pajak yang relatif ringan.

5.2.6. Karakteristik Berdasarkan Kepemilikan Tempat Usaha

Kepemilikan tempat usaha dapat mempengaruhi cara restoran mengelola

pajak dan kepatuhan mereka terhadap regulasi perpajakan. Tabel berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan kepemilikan tempat usaha:

Tabel 5. 8 Karakteristik Berdasarkan Kepemilikan Tempat Usaha

Kategori Kepemilikan Tempat Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Milik Sendiri	45	66,2
Sewa	19	27,9
Hibah	3	4,4
Lainnya	1	1,5
Total	68	100

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Dari tabel 5.8, mayoritas restoran, yaitu 45 restoran atau 66,2%, memiliki tempat usaha yang dimiliki secara pribadi. Kepemilikan sendiri sering kali memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan usaha dan kepatuhan pajak, karena pemilik dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan terkait perawatan dan perbaikan tempat usaha. Sebanyak 19 restoran atau 27,9% menyewa tempat usaha mereka. Restoran dalam kategori ini menghadapi tantangan terkait pengelolaan pajak yang berbeda, seperti tanggung jawab untuk biaya sewa dan pemeliharaan tempat usaha yang tidak selalu dapat dikontrol sepenuhnya oleh penyewa.

Ada 3 restoran atau 4,4% yang mendapatkan tempat usaha mereka melalui hibah. Kepemilikan hibah mempengaruhi cara restoran tersebut mengelola pajak, tergantung pada ketentuan dari pemberi hibah dan peraturan yang berlaku. Terakhir, 1 restoran atau 1,5% mencatatkan kategori 'lainnya' untuk kepemilikan tempat usaha. Kategori ini mencakup berbagai bentuk kepemilikan yang tidak

umum atau spesifik, yang dapat mempengaruhi aspek pengelolaan pajak secara berbeda.

5.2.7. Karakteristik Berdasarkan Bentuk Hukum Usaha

Bentuk hukum usaha mempengaruhi tanggung jawab hukum dan perpajakan yang harus dipatuhi oleh restoran. Tabel berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan bentuk hukum usaha:

Tabel 5. 9 Karakteristik Berdasarkan Bentuk Hukum Usaha

Kategori Bentuk Hukum Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Perseorangan	20	29,4
CV (<i>Commanditaire Vennootschap</i>)	22	32,4
Kategori Bentuk Hukum Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
PT (Perseroan Terbatas)	24	35,3
Lainnya	2	2,9
Total	68	100

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan tabel 5.9, bentuk hukum usaha yang paling banyak dipilih adalah Perseroan Terbatas (PT), dengan 24 restoran atau 35,3% dari total responden. PT adalah bentuk hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemiliknya dan sering kali dipilih oleh usaha dengan skala yang lebih besar atau yang memerlukan pembatasan tanggung jawab pribadi. Sebanyak 22 restoran atau 32,4% beroperasi sebagai CV (*Commanditaire Vennootschap*). CV merupakan bentuk usaha yang umum di Indonesia, di mana terdapat perbedaan antara sekutu aktif dan sekutu pasif dalam tanggung jawab hukum dan keuntungan. 20 restoran atau 29,4% beroperasi sebagai usaha perseorangan.

Bentuk usaha ini sering dipilih oleh pengusaha kecil karena kemudahan dalam pengelolaan dan pendaftaran. Namun, pemilik perseorangan biasanya memiliki tanggung jawab pribadi yang lebih besar terhadap utang usaha. Ada 2 restoran atau 2,9% yang tergolong dalam kategori 'lainnya,' yang mungkin mencakup berbagai bentuk hukum usaha yang tidak umum atau spesifik.

5.3. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 26 indikator yang dipilih untuk menggambarkan variabel yang diteliti. Nilai indeks pada penelitian ini diukur berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden melalui kuesioner. Setiap kuesioner berisi pertanyaan yang bertujuan untuk memahami persepsi responden mengenai fenomena yang sedang diteliti. Untuk menginterpretasikan data, nilai indeks dihitung dengan menjumlahkan nilai indeks dari masing-masing indikator pada setiap variabel dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{((\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + \dots + (\%F10 \times 5))}{5}$$

Keterangan :

NI = Nilai Indeks Persepsional

F1 = Frekuensi responden yang menjawab skor 1

F2 = Frekuensi responden yang menjawab skor 2

F5 = Frekuensi responden yang menjawab skor 5

Rumus untuk menghitung nilai indeks terdiri dari penjumlahan frekuensi jawaban responden, di mana skala jawaban berkisar antara 1 hingga 5. Setelah proses rekapitulasi dan penyaringan data, nilai indeks diperoleh dengan membagi total jawaban responden dengan lima (Ferdinand, 2014b). Ferdinand (2014b) juga menggunakan metode pengkategorian tiga kotak (*three-box method*) sebagai

panduan untuk mengklasifikasikan indeks berdasarkan kategori nilai yang berbeda, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kuesioner yang disebarakan kepada responden menggunakan skala 1 sampai 5. Berdasarkan skala ini, nilai indeks yang dihasilkan berada dalam rentang 5 hingga 25, sehingga terdapat rentang nilai 20 untuk masing-masing kategori. Rentang angka ini kemudian dibagi menjadi tiga interpretasi sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.

Tabel 5. 10 *Three Box Method* untuk Nilai Indeks

Kriteria	Interval	Keterangan
Kriteria 1	1.00 – 2.99	Rendah
Kriteria 2	3.00 – 3.99	Sedang
Kriteria 3	4.00 – 5.00	Tinggi

Sumber: Ferdinand (2014)

Tabel 5.10 menunjukkan nilai indeks membantu dalam memahami sejauh mana persepsi responden terhadap variabel yang diteliti, mulai dari persepsi yang rendah hingga tinggi.

5.3.1. Deskripsi Variabel *E-Commerce*

Variabel *E-Commerce* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana teknologi *e-commerce* memengaruhi berbagai aspek, seperti kemudahan transaksi, pengelolaan omzet, dan fasilitas pembayaran pajak. Nilai indeks untuk variabel *E-Commerce* diukur dengan menggunakan skala 1 sampai 5 pada kuesioner. Setiap indikator diberi penilaian berdasarkan jawaban responden, yang kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks total.

Tabel 5. 11 Nilai Indeks Variabel *E-Commerce*

Indikator	Skor Pernyataan Responden					Indeks	Kategori
	1	2	3	4	5		
<i>E-Commerce 1</i>	22	16	0	24	6	2.65	Rendah
<i>E-Commerce 2</i>	10	17	0	28	13	3.25	Sedang
<i>E-Commerce 3</i>	13	20	0	21	14	3.04	Sedang
<i>E-Commerce 4</i>	10	18	0	25	15	3.25	Sedang
<i>E-Commerce 5</i>	12	18	0	22	18	3.32	Sedang
Rata-Rata Indeks <i>E-Commerce</i>						3.10	Sedang

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Tabel 5.11 menunjukkan hasil perhitungan nilai indeks untuk lima indikator variabel *E-Commerce*. Hasil menunjukkan bahwa indikator *E-Commerce* 1, dengan nilai indeks 2.65, berada dalam kategori "Rendah", menandakan persepsi responden yang kurang positif. Indikator *E-Commerce* 2, 3, 4, dan 5, dengan nilai indeks masing-masing 3.25, 3.04, 3.25, dan 3.32, semuanya termasuk dalam kategori "Sedang". Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap indikator-indikator berada pada tingkat netral atau moderat. Berikut ini merupakan deskripsi kuantitatif dari perspektif responden mengenai variabel *E-Commerce* berdasarkan pernyataan terbuka sebagai berikut:

Tabel 5. 12 Persepsi Responden Pada Variabel *E-Commerce*

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
<i>E-Commerce 1</i>	2.65 (Rendah)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Dengan adanya <i>e-commerce</i>, konsumen mengetahui detail dan transaksi restoran tanpa harus ke lokasi. (18 responden) 2. Konsumen lebih nyaman apabila datang langsung ke restoran. (30 responden) 3. Dengan adanya <i>e-commerce</i> menambah biaya/harga. (20 responden) 4. Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa penggunaan <i>e-commerce</i> dianggap kurang memadai oleh konsumen, karena biaya transaksi yang meningkat dan preferensi untuk kehadiran langsung ke restoran.
<i>E-Commerce 2</i>	3.25 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Dengan adanya <i>e-commerce</i>, data transaksi termasuk pajak sudah bisa diakses langsung secara real-time oleh user. (40 responden) 2. Walaupun sudah dimunculkan oleh teknologi <i>e-commerce</i>, data transaksi masih perlu dilakukan rekonsiliasi oleh user. (15 responden) 3. Data <i>e-commerce</i> terkadang masih terjadi error. (13 responden) 4. Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa <i>e-commerce</i> mempermudah akses data transaksi secara real-time namun masih memerlukan rekonsiliasi manual dan perbaikan pada sistem untuk mengurangi error.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
<i>E-Commerce 3</i>	3.04 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Di <i>e-commerce</i>, user dipermudah dalam melakukan pembayaran pajak restorannya. (35 responden) 2. Walaupun sudah tersedia, tetap masih perlu dilakukan rekonsiliasi. (18 responden) 3. Data <i>e-commerce</i> terkadang masih error. (15 responden) 4. Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa <i>e-commerce</i> mempermudah pembayaran pajak tetapi memerlukan pengecekan manual dan perbaikan sistem untuk mengatasi error.
<i>E-Commerce 4</i>	3.25 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Di <i>e-commerce</i>, user dipermudah dalam melakukan pembayaran pajak restorannya. (38 responden) 2. Walaupun sudah tersedia, tetap masih perlu dilakukan rekonsiliasi. (16 responden) 3. Fasilitas pembayaran pajak di <i>e-commerce</i> terkadang masih error dan tidak terkoneksi dengan platform pemerintah daerah. (14 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa <i>e-commerce</i> mempermudah pembayaran pajak, namun masih terdapat masalah teknis dan konektivitas dengan platform pemerintah daerah.

Indikator	Nilai Indeks & Interprestasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
<i>E-Commerce 5</i>	3.32 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. User terbantu dalam mengidentifikasi jenis dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. (30 responden) 2. Masih harus dilakukan pengecekan kembali secara manual untuk penentuan jenis pajaknya. (20 responden) 3. Dengan ditambahnya fitur jenis pajak dalam platform <i>e-commerce</i>, tampilan antarmukanya mempersulit user dalam menggunakan aplikasi. (18 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan <i>bahwa e-commerce</i> membantu dalam identifikasi pajak, tetapi tampilan antarmuka yang kompleks dan kebutuhan pengecekan manual mengurangi kenyamanan pengguna.

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan Tabel 5.12, dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap penggunaan *e-commerce* dalam pelaporan dan pembayaran pajak restoran menunjukkan kecenderungan cukup positif namun belum optimal, dengan beberapa catatan penting pada masing-masing indikator. Temuan dari *E-Commerce 1* menunjukkan bahwa konsumen merasa *e-commerce* kurang memadai. Selain itu, adanya biaya tambahan saat menggunakan *e-commerce* menjadi alasan ketidakpuasan. Perlunya perbaikan dalam sistem *e-commerce* agar lebih hemat biaya dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna.

Sementara itu, temuan dari *E-Commerce 2* hingga *E-Commerce 4* menunjukkan bahwa *e-commerce* mempermudah akses data transaksi dan pembayaran pajak secara real-time. Namun, masih ada masalah seperti kebutuhan untuk pengecekan manual dan adanya error teknis. *E-Commerce 2* menunjukan bahwa meskipun data transaksi dapat diakses secara langsung, masih diperlukan rekonsiliasi manual dan perbaikan sistem untuk mengurangi *error*. Hal serupa juga ditemukan pada *E-Commerce 3* dan *E-Commerce 4*, di mana meskipun *e-commerce* memudahkan pembayaran pajak, terdapat masalah teknis dan integrasi dengan platform pemerintah daerah.

Di sisi lain, *E-Commerce 5* menunjukkan bahwa *e-commerce* membantu dalam mengidentifikasi jenis dan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi antarmuka yang kompleks dan kebutuhan pengecekan manual mengurangi kenyamanan pengguna. Secara keseluruhan, persepsi responden menunjukan bahwa meskipun *e-commerce* menawarkan berbagai keuntungan, perlu ada perbaikan dalam sistem seperti pengurangan biaya, peningkatan integrasi teknis, dan penyederhanaan antarmuka agar lebih memuaskan dan efektif dalam penggunaannya.

5.3.2. Deskripsi Variabel *Self Assessment System*

Variabel SAS terdiri dari delapan indikator yang masing-masing dinilai menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Untuk menggambarkan persepsi responden terhadap variabel ini, dilakukan perhitungan nilai indeks berdasarkan jawaban dari kuesioner. Berikut tabel nilai indeks:

Tabel 5. 13 Nilai Indeks Variabel *Self Assessment System*

Indikator	Skor Pernyataan Responden					Indeks	Kategori
	1	2	3	4	5		
SAS 1	17	14	0	26	11	3.11	Sedang
SAS 2	12	18	0	25	13	3.16	Sedang
SAS 3	15	16	0	28	9	3.06	Sedang
SAS 4	16	14	0	22	16	3.06	Sedang
SAS 5	10	12	0	30	16	3.32	Sedang
SAS 6	14	12	0	29	13	3.22	Sedang
SAS 7	20	14	0	22	12	2.98	Sedang
SAS 8	18	16	0	23	11	3.04	Sedang
Rata-Rata Indeks <i>Self Assessment System</i>						3.09	Sedang

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan tabel 5.13, indikator SAS 1 hingga SAS 8 menunjukkan nilai indeks dalam kategori "Sedang", dengan rentang nilai indeks antara 2.98 hingga 3.32. Hal ini mencerminkan bahwa persepsi responden terhadap variabel *Self Assessment System* cenderung berada pada tingkat moderat atau netral. Rata-rata nilai indeks untuk seluruh indikator adalah 3.09, juga berada dalam kategori "Sedang". Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, persepsi responden terhadap sistem penilaian diri adalah pada tingkat yang cukup stabil atau moderat, dengan beberapa indikator menunjukkan sedikit variasi dalam persepsi.

Berikut ini merupakan deskripsi dari perspektif responden mengenai variabel *Self Assessment System* berdasarkan pernyataan terbuka sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Persepsi Responden Pada Variabel *Self Assessment System*

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
SAS 1	3.11 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Sebagai warga negara yang baik, harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan membantu pembangunan daerah. (45 responden) 2. Dengan memiliki NPWPD tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap usaha restoran user. (15 responden) 3. Dengan memiliki NPWPD, merasa terbebani dengan pembayaran pajak restoran. (8 responden) 4. Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan NPWPD dianggap sebagai tanggung jawab, meskipun banyak pengguna merasa bahwa NPWPD tidak memberikan dampak signifikan terhadap usaha restoran mereka, serta adanya beban tambahan dalam pembayaran pajak.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
SAS 2	3.16 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Dengan pembuatan NPWPD secara online, user tidak perlu harus datang ke Kantor Bapenda sehingga mempersingkat waktu dan tenaga. (40 responden) 2. Akses dan durasi waktu pembuatan NPWPD tidak begitu berpengaruh terhadap user. (18 responden) 3. Dokumen yang harus dilampirkan/diunggah menyulitkan user dalam mendaftarkan NPWPD. (10 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa sistem pembuatan NPWPD online memberikan kemudahan dalam hal waktu dan tenaga, namun proses pengunggahan dokumen masih dianggap merepotkan dan tidak memiliki dampak signifikan pada akses dan durasi pembuatan NPWPD.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
SAS 3	a. (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. User dapat membuat NPWPD usaha restoran secara mudah kapanpun dan dimanapun. (30 responden) 2. Terkadang ada jeda waktu dalam penyampaian kartu fisik NPWPD oleh petugas dengan waktu pemberian notifikasi online NPWPD. (22 responden) 3. Dalam proses pembuatan NPWPD melebihi batas waktu yang ditentukan. (16 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa pembuatan NPWPD bisa dilakukan dengan mudah kapan saja, namun ada beberapa masalah terkait jeda waktu dalam pengiriman kartu fisik dan proses yang melebihi batas waktu yang ditentukan.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
SAS 4	3.06 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Informasi terkait tarif dan tata cara penghitungan pajak sudah disampaikan dengan jelas oleh petugas. (32 responden) 2. Informasi terkait penghitungan pajak dapat diakses secara mandiri oleh user tanpa penjelasan dari petugas. (18 responden) 3. Masih banyak informasi pajak restoran yang belum tersampaikan. (18 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai tarif dan tata cara penghitungan pajak sudah jelas dan bisa diakses mandiri, namun masih terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi pajak restoran secara lengkap.

Indikator	Nilai Indeks & Interprestasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
SAS 5	3.32 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena pajak restoran yang user pungut sudah dibebankan dari transaksi konsumen. (35 responden) 2. Pajak restoran yang dibebankan ke konsumen menambah harga makanan yang dijual oleh user. (20 responden) 3. Pajak restoran yang harus dibayarkan membebani keuangan pengusaha restoran. (13 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa pajak restoran yang dibebankan kepada konsumen berpengaruh pada harga makanan, dan hal ini memberikan beban tambahan pada keuangan pengusaha restoran.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
SAS 6	3.22 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Dengan membayarkan pajak tepat waktu termasuk patuh pada perundangan yang berlaku dan tidak terkena sanksi administrasi berupa denda. (38 responden) 2. Tidak ada pengaruh secara langsung saat pembayaran pajak tepat waktu. (16 responden) 3. Terkadang masih banyak pembayaran yang harus diutamakan dibanding pembayaran pajak restoran. (14 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak tepat waktu dianggap penting untuk menghindari sanksi, tetapi tidak memberikan dampak langsung yang signifikan dan seringkali pembayaran pajak restoran menjadi prioritas yang lebih rendah dibandingkan kewajiban pembayaran lainnya.

Indikator	Nilai Indeks & Interprestasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
SAS 7	2.98 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena pajak restoran yang user pungut sudah dibebankan dari transaksi konsumen. (28 responden) 2. Pajak restoran yang dibebankan ke konsumen menambah harga makanan yang dijual oleh user. (22 responden) 3. Pajak restoran yang harus dibayarkan membebani keuangan pengusaha restoran. (18 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa pajak restoran yang dibebankan ke konsumen mempengaruhi harga makanan dan memberikan beban pada keuangan pengusaha restoran.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
SAS 8	3.04 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Dengan membayarkan pajak tepat waktu termasuk patuh pada perundangan yang berlaku dan tidak terkena sanksi administrasi berupa denda. (33 responden) 2. Tidak ada pengaruh secara langsung saat pembayaran pajak tepat waktu. (19 responden) 3. Terkadang masih banyak pembayaran yang harus diutamakan dibanding pembayaran pajak restoran. (16 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa meskipun pembayaran pajak tepat waktu penting untuk menghindari denda, tidak memberikan dampak langsung yang signifikan dan sering kali perlu prioritas dibandingkan kewajiban lainnya.

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan tabel 5.14, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan pajak, khususnya NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), dianggap penting oleh sebagian besar responden sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Temuan dari SAS 1 menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan NPWPD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap bisnis restoran, beberapa pengguna merasa terbebani dengan pembayaran pajak yang

harus dilakukan. Dalam konteks pembuatan NPWPD secara online (SAS 2), kemudahan yang diberikan memang diakui dapat menghemat waktu dan tenaga, namun masih ada keluhan terkait proses pengunggahan dokumen yang dianggap merepotkan oleh beberapa responden.

Selain itu, SAS 4 hingga SAS 7 menunjukkan bahwa informasi terkait penghitungan pajak restoran umumnya sudah jelas, namun masih ada kekurangan dalam penyampaian informasi secara lengkap. Pajak restoran yang dibebankan kepada konsumen juga diakui mempengaruhi harga makanan dan memberikan beban finansial tambahan bagi pengusaha restoran. Meski pembayaran pajak tepat waktu dianggap penting untuk menghindari sanksi administratif, banyak responden merasa bahwa hal ini tidak memberikan dampak langsung yang signifikan, dan sering kali pembayaran pajak menjadi prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban lain.

5.3.3. Deskripsi Variabel Kepatuhan Pajak

Variabel ini diukur menggunakan enam indikator yang dinilai dengan skala Likert 1 hingga 5.

Tabel 5. 15 Nilai Indeks Variabel Kepatuhan Pajak

Indikator	Skor Pernyataan Responden					Indeks	Kategori
	1	2	3	4	5		
KP 1	22	12	0	23	11	3.10	Sedang
KP 2	14	18	0	25	11	3.10	Sedang
KP 3	15	13	0	30	10	3.04	Sedang
KP 4	18	14	0	22	14	3.14	Sedang
KP 5	12	16	0	28	12	3.22	Sedang
KP 6	20	15	0	22	11	2.98	Sedang
Rata-Rata Indeks Kepatuhan Pajak						3.09	Sedang

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan tabel 5.15, nilai indeks untuk indikator KP 1 hingga KP 6 menunjukkan kategori "Sedang", dengan rentang nilai indeks antara 2.98 hingga

3.22. Hasil ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan pajak cenderung berada pada tingkat moderat atau netral. Rata-rata nilai indeks untuk seluruh indikator adalah 3.09, yang juga termasuk dalam kategori "Sedang". Hasil ini menggambarkan bahwa secara umum, tingkat kepatuhan pajak responden berada pada tingkat yang cukup stabil atau moderat, dengan variasi yang tidak terlalu besar di antara indikator-indikator tersebut.

Berikut ini merupakan deskripsi dari perspektif responden mengenai variabel Kepatuhan Pajak berdasarkan pernyataan terbuka sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Persepsi Responden pada Variabel Kepatuhan Pajak

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
KP 1	3.10 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena sebagai warga yang baik harus mematuhi perundangan yang berlaku. (40 responden) 2. Pelayanan pembuatan NPWPD tidak mudah dan harus aktif. (30 responden) 3. Dengan memiliki NPWPD, maka dibebani kewajiban untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak restoran. (20 responden) 4. Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk mematuhi perundangan dan melaporkan pajak restoran dirasakan sebagai beban, serta pelayanan pembuatan NPWPD dinilai tidak mudah dan memerlukan keaktifan dari pengguna.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
KP 2	3.10 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena dengan memiliki NPWPD, user mempunyai kewajiban membayar pajak restoran. (35 responden) 2. Dengan membayar pajak restoran, saya tidak merasakan secara langsung manfaatnya. (25 responden) 3. Dengan membayar pajak, saya merasa terbebani. (15 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa kewajiban membayar pajak restoran dirasakan tidak memberikan manfaat langsung dan memberikan beban tambahan bagi pengguna.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
KP 3	3.04 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Pajak restoran yang saya bayar, sudah dibebankan ke konsumen. (40 responden) 2. Besaran pajak restoran yang harus disetorkan harus saya hitung kembali karena harga menu sudah termasuk pajak dan terdapat transaksi berupa compliment dan diskon. (25 responden) 3. Dengan penambahan pajak restoran, menambah nominal harga makanan/minuman. (15 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa beban pajak restoran dirasakan sudah termasuk dalam harga yang dibebankan kepada konsumen, namun memerlukan perhitungan tambahan untuk transaksi dengan diskon dan complimentary, yang dapat meningkatkan harga makanan dan minuman.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
KP 4	3.14 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Dengan melakukan pembayaran pajak restoran tepat waktu saya tidak terkena sanksi administrasi berupa denda. (35 responden) 2. Saya tidak merasakan pengaruh secara langsung jika membayarkan pajak secara tepat waktu. (22 responden) 3. Masih ada prioritas lain yang perlu dibayarkan selain pajak restoran. (18 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak tepat waktu mencegah denda, namun tidak memberikan dampak langsung yang signifikan, dan seringkali terdapat prioritas pembayaran lain yang lebih penting.

Indikator	Nilai Indeks & Interprestasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
KP 5	(Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Dengan membayarkan pajak restoran sesuai dengan yang dilaporkan pada SPT berarti mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. (38 responden) 2. Dengan adanya kewajiban mekanisme setor dan lapor pajak, saya merasa kesulitan karena belum mendapat informasi secara jelas. (25 responden) 3. Masih ada prioritas lain yang perlu dibayarkan selain pajak restoran. (15 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa membayar pajak sesuai dengan SPT adalah bentuk kepatuhan perpajakan, tetapi mekanisme setor dan lapor pajak masih dianggap menyulitkan tanpa informasi yang jelas, serta terdapat prioritas pembayaran lain yang lebih penting.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
KP 6	2.98 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa pajak dipungut dan dibebankan kepada konsumen restoran. (30 responden) 2. Tidak membebani usaha secara langsung, namun mempengaruhi psikologis konsumen saat ingin berbelanja karena ada biaya pajak yang harus dibayarkan. (22 responden) 3. Terlalu banyak beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha. (18 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa meskipun pajak restoran yang dibebankan kepada konsumen tidak secara langsung membebani usaha, namun mempengaruhi psikologis konsumen dan menambah beban biaya pemilik usaha.

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan tabel 5.16 dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap kewajiban pajak restoran cenderung berada pada tingkat sedang. Pada indikator KP 1, mayoritas responden mengakui pentingnya mematuhi perundangan sebagai warga negara yang baik, namun pelayanan dalam proses pembuatan NPWPD dianggap sulit dan memerlukan keaktifan pengguna. Selain itu, kewajiban melaporkan dan membayar pajak restoran dianggap sebagai beban tambahan yang

dirasakan oleh para pengusaha.

Pada indikator KP 2 dan KP 3, kewajiban membayar pajak restoran juga dipandang tidak memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha. Sebanyak 35 responden menyatakan bahwa mereka merasa terbebani oleh pajak restoran, dan beberapa mengungkapkan bahwa pajak ini tidak menambah nilai bagi usaha mereka. Meskipun pajak sudah dibebankan kepada konsumen, perhitungan tambahan untuk transaksi yang melibatkan diskon dan compliment dirasakan mempersulit pelaku usaha. Secara umum, pajak restoran berpengaruh pada harga makanan dan minuman yang dijual, yang pada akhirnya menambah beban psikologis konsumen dan juga pemilik usaha, meskipun beban langsung terhadap bisnis tidak terlalu signifikan.

5.3.4. Deskripsi Variabel Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi

Variabel ini diukur menggunakan tujuh indikator dengan skala Likert dari 1 hingga 5, yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan penerimaan teknologi dalam pengawasan pajak.

Tabel 5. 17 Nilai Indeks Variabel Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi

Indikator	Skor Pernyataan Responden					Indeks	Kategori
	1	2	3	4	5		
PPBT 1	20	15	0	20	13	3.05	Sedang
PPBT 2	15	10	0	30	13	3.20	Sedang
PPBT 3	12	17	0	25	14	3.18	Sedang
PPBT 4	18	12	0	22	16	3.20	Sedang
PPBT 5	16	14	0	28	10	3.04	Sedang
PPBT 6	21	14	0	19	14	2.98	Sedang
PPBT 7	17	10	0	24	17	3.22	Sedang
Rata-Rata Indeks PPBT						3.11	Sedang

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan tabel 5.17 menunjukkan bahwa nilai indeks untuk semua indikator PPBT berada dalam kategori "Sedang", dengan rentang nilai indeks antara 2.98 hingga 3.22. Hasil ini menggambarkan bahwa persepsi responden terhadap pengawasan pajak berbasis teknologi cenderung berada pada tingkat moderat. Rata-rata nilai indeks untuk semua indikator PPBT adalah 3.11, yang juga termasuk dalam kategori "Sedang". Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan dalam pengawasan pajak dianggap cukup efektif, meskipun ada ruang untuk perbaikan. Secara keseluruhan, variabel ini menunjukkan tingkat penerimaan dan efektivitas yang stabil namun moderat di antara responden.

Berikut ini merupakan deskripsi dari perspektif responden mengenai variabel Persepsi Responden pada Variabel Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi berdasarkan pernyataan terbuka sebagai berikut:

Tabel 5. 18 Persepsi Responden pada Variabel Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
PPBT 1	3.05 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena saya dapat mengawasi jumlah transaksi dan pajak yang dipungut secara real time. (32 responden) 2. Penggunaan e-commerce tidak selalu memudahkan karena terkadang terdapat maintenance atau error sistem. (28 responden) 3. Saya perlu melakukan pengecekan kembali

		terhadap data transaksi yang ditampilkan di e-commerce. (20 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa meskipun e-commerce memungkinkan pemantauan transaksi secara real time, masalah teknis seperti maintenance atau error sistem masih menjadi kendala, sehingga pengecekan ulang terhadap data transaksi tetap diperlukan.
PPBT 2	3.20 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena saya dapat mengawasi jumlah transaksi dan pajak yang dipungut secara real time. (35 responden) 2. Penggunaan e-commerce tidak selalu memudahkan karena terkadang terdapat maintenance atau error sistem. (25 responden) 3. Saya perlu melakukan pengecekan kembali terhadap data transaksi yang ditampilkan di e-commerce. (15 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-commerce memudahkan pengawasan transaksi secara real time, namun masih terdapat masalah teknis yang menyebabkan perlunya pengecekan ulang terhadap data.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
PPBT 3	3.18 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Dapat menghemat waktu pemilik usaha karena dapat menghitung dan membayarkan pajak restorannya dalam satu platform yang sama. (38 responden) 2. Perlu melakukan pengecekan kembali terhadap data transaksi yang ditampilkan di e-commerce. (22 responden) 3. Data yang ditampilkan pada e-commerce tidak sama dengan data pada kasir restoran dan data dari pihak pajak daerah sehingga menambah beban pada saat menghitung pajak restorannya. (15 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa meskipun e-commerce dapat menghemat waktu dengan menyediakan platform terpadu, adanya ketidakcocokan data antara e-commerce, kasir, dan pajak daerah menambah beban dalam perhitungan pajak.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
PPBT 4	3.20 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena dengan memanfaatkan teknologi dapat memberi kemudahan bagi pemilik usaha maupun petugas dalam membuat NPWPD dengan lebih cepat. (36 responden) 2. Dengan menggunakan teknologi dalam membuat NPWPD, petugas perlu melakukan verifikasi untuk memastikan data yang didapat karena tidak bertemu secara langsung dengan pemilik usaha. (24 responden) 3. Tidak semua pemilik usaha paham teknologi dan membutuhkan biaya untuk mengaksesnya. (18 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa teknologi mempermudah pembuatan NPWPD namun memerlukan verifikasi tambahan dan ada tantangan dalam hal pemahaman teknologi dan biaya akses bagi sebagian pemilik usaha.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
PPBT 5	3.04 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena data yang dilaporkan dapat langsung dihitung dan terintegrasi secara online untuk kemudian dibayarkan pajak restorannya. (30 responden) 2. Perhitungan otomatis tidak selalu memudahkan karena diperlukan rekonsiliasi data transaksi dengan perhitungan pajaknya terlebih dahulu. (25 responden) 3. Data pajak yang dihimpun secara online tidak selalu sama dengan transaksi yang ada sehingga merugikan pemilik usaha. (15 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem online menyediakan integrasi data dan perhitungan otomatis, rekonsiliasi data tetap diperlukan untuk memastikan kesesuaian, dan ketidaksesuaian data dapat merugikan pemilik usaha.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
PPBT 6	2.98 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena dengan adanya portal satu pintu tidak banyak menyita waktu pengguna dalam membayarkan pajaknya. (30 responden) 2. Perbedaan metode pembayaran pajak belum tentu bisa diakomodir oleh satu portal pajak yang sama. (22 responden) Dengan hanya memiliki portal pajak satu pintu menyebabkan tidak ada pilihan alternatif lain jika portal tersebut terjadi error atau maintenance. (18 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa meskipun portal satu pintu mengurangi waktu pengguna dalam membayar pajak, keterbatasan dalam metode pembayaran dan ketiadaan alternatif saat terjadi error atau maintenance menjadi kendala.

Indikator	Nilai Indeks & Interpretasi	Temuan Penelitian – Persepsi Responden
PPBT 7	3.22 (Sedang)	Temuan empiris sebagai berikut: 1. Karena dengan formulir elektronik dapat mempermudah pemilik usaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dimanapun dan kapanpun. (34 responden) 2. Formulir elektronik belum tentu membantu jika perangkat yang digunakan oleh pemilik usaha belum mumpuni dan pengguna belum begitu melek teknologi. (26 responden) 3. Terdapat maintenance yang dilakukan secara berkala dan sistem yang terkadang error sehingga menyulitkan pemilik usaha saat ingin melakukan kewajiban perpajakannya. (20 responden) Berdasarkan temuan empiris dapat disimpulkan bahwa formulir elektronik mempermudah kewajiban perpajakan tetapi kendala seperti perangkat yang tidak memadai dan masalah sistem mempengaruhi kemudahan penggunaannya.

Sumber: Data Primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan tabel 5.18, menunjukkan persepsi responden terhadap penggunaan *e-commerce* untuk kepatuhan pajak restoran berada pada tingkat sedang. Pada PPBT 1 dan PPBT 2, mayoritas responden merasa terbantu dengan fitur pemantauan transaksi secara *real-time* yang memudahkan pengawasan jumlah pajak yang dipungut. Namun, kendala teknis seperti *maintenance* dan *error sistem* menjadi tantangan, sehingga pengguna harus melakukan pengecekan ulang terhadap data transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan kemudahan, tetap ada hambatan dalam implementasinya yang mempengaruhi efisiensi proses perpajakan.

Selanjutnya, pada PPBT 3 dan PPBT 4, *e-commerce* dianggap mampu menghemat waktu bagi pemilik usaha karena menghitung dan membayar pajak dapat dilakukan dalam satu platform yang terpadu. Meskipun demikian, ketidakcocokan data antara sistem *e-commerce*, kasir restoran, dan pajak daerah menambah beban kerja saat perhitungan pajak dilakukan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembuatan NPWPD juga dipandang bermanfaat, namun verifikasi tambahan diperlukan untuk memastikan keakuratan data, dan beberapa pemilik usaha menghadapi tantangan dalam mengakses dan memahami teknologi tersebut. Keterbatasan pemahaman teknologi dan biaya akses juga menjadi kendala dalam optimalisasi penggunaan sistem berbasis teknologi ini.

5.4. Uji Indikasi Reflektif Variabel Penelitian

Uji indikasi reflektif untuk variabel penelitian yang diukur menggunakan model kausal sebagaimana diusulkan oleh Haynes et al. (1995). Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan variabel laten yang diukur. Dengan kata lain, indikator-indikator

ini seharusnya dapat memprediksi atau mencerminkan variasi dalam variabel laten tersebut. Dalam model kausal reflektif, variabel laten dianggap sebagai penyebab dari perubahan dalam indikator. Oleh karena itu, setiap indikator harus memiliki korelasi yang kuat dengan variabel laten yang diwakilinya.

5.4.1. Uji Reflektif *E-Commerce*

Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat kelogisan indikasi dari variabel reflektif dengan variabelnya.

Tabel 5. 19 Hubungan Logika Semantik *E-Commerce*

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
<i>E-commerce</i> → Teknologi <i>e-commerce</i> memudahkan transaksi bisnis restoran yang saya kelola.	Teknologi <i>e-commerce</i> memudahkan dalam proses transaksi bisnis, menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan restoran. Semakin canggih teknologi <i>e-commerce</i> yang digunakan, semakin mudah restoran mengelola transaksi secara efektif dan efisien.	Logis
<i>E-commerce</i> → Teknologi <i>e-commerce</i> memudahkan perhitungan omzet pendapatan serta pajak restoran yang harus dibayarkan.	Teknologi <i>e-commerce</i> mempermudah manajemen keuangan dengan memfasilitasi perhitungan omzet dan pajak secara otomatis. Penggunaan teknologi <i>e-commerce</i> membantu restoran mengelola keuangan dan kewajiban pajak dengan lebih akurat dan cepat.	Logis

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
<i>E-commerce</i> → Platform <i>e-commerce</i> untuk restoran menyediakan fasilitas pembayaran pajak secara otomatis.	Fasilitas otomatisasi pajak oleh <i>platform e-commerce</i> mengurangi beban administrasi manual dalam pembayaran pajak. Semakin andal fitur otomatisasi pembayaran pajak, semakin ringan beban administrasi yang harus ditangani oleh restoran.	Logis
<i>E-commerce</i> → Fasilitas pembayaran pajak yang disediakan oleh platform <i>e-commerce</i> sudah termasuk pajak restoran.	Platform <i>e-commerce</i> memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan secara otomatis dan sudah termasuk dalam transaksi. Fasilitas ini membantu memastikan kepatuhan pajak tanpa perlu intervensi manual dari pihak restoran.	Logis
<i>E-commerce</i> → Platform <i>e-commerce</i> menjelaskan detil jenis pajak apa saja yang dibayarkan secara otomatis melalui aplikasinya.	Platform <i>e-commerce</i> memberikan transparansi kepada restoran terkait jenis-jenis pajak yang dibayarkan secara otomatis melalui aplikasi. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform <i>e-commerce</i> dan memastikan kepatuhan pajak yang jelas.	Logis

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber untuk pengembangan Disertasi (2024)

5.4.2. Uji Reflektif *Self Assessment System*

Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat kelogisan indikasi dari variabel reflektif dengan variabelnya.

Tabel 5. 20 Hubungan Logika Semantik *Self Assessment System*

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
<i>Self Assessment System</i> → Sebagai warga negara yang baik, saya harus memiliki NPWP atas usaha restoran yang saya kelola.	Kepemilikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, memastikan bahwa setiap usaha terdaftar dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum.	Logis
<i>Self Assessment System</i> → Proses pembuatan NPWP sederhana dan memudahkan saya.	Proses yang sederhana dalam pembuatan NPWP memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, mengurangi hambatan administratif yang mungkin menghalangi pendaftaran usaha secara resmi.	Logis
<i>Self Assessment System</i> → Proses pembuatan NPWP membutuhkan waktu yang relatif sebentar.	Proses pendaftaran NPWP yang cepat meningkatkan efisiensi dan memotivasi lebih banyak pengusaha untuk segera mendaftarkan usahanya, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.	Logis

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
<i>Self Assessment</i> System → Saya dapat menghitung jumlah pajak restoran yang perlu dibayarkan dengan mudah.	Kemudahan dalam perhitungan pajak memungkinkan wajib pajak untuk secara akurat menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan, meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak.	Logis
<i>Self Assessment</i> System → Saya selalu membayarkan pajak restoran dengan jumlah yang sesuai.	Membayar pajak dengan jumlah yang sesuai menunjukkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak, yang juga mencerminkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.	Logis
<i>Self Assessment</i> System → Saya selalu membayarkan pajak restoran dengan tepat waktu.	Pembayaran pajak tepat waktu menghindarkan wajib pajak dari denda atau sanksi, serta menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab perpajakan.	Logis
<i>Self Assessment</i> System → Saya selalu melaporkan pajak restoran yang saya bayarkan dengan jumlah yang sesuai.	Pelaporan pajak yang akurat dan sesuai dengan jumlah yang dibayarkan menunjukkan transparansi dan kepatuhan penuh terhadap aturan perpajakan.	Logis

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
Self Assessment System → Saya selalu melaporkan pajak restoran yang saya bayarkan dengan tepat waktu.	Pelaporan pajak tepat waktu memastikan bahwa wajib pajak mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan menghindari sanksi yang mungkin timbul dari keterlambatan pelaporan.	Logis

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber untuk pengembangan Disertasi (2024)

5.4.3. Uji Reflektif Kepatuhan Pajak

Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat kelogisan indikasi dari variabel reflektif dengan variabelnya.

Tabel 5. 21 Hubungan Logika Semantik Kepatuhan Pajak

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
Kepatuhan Pajak → Restoran yang saya kelola harus memiliki NPWPD.	Kepemilikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) merupakan dasar legal bagi restoran untuk terdaftar sebagai wajib pajak, memastikan semua pendapatan usaha dilaporkan dan pajak dibayarkan.	Logis
Kepatuhan Pajak → Saya harus selalu membayar pajak restoran sebab saya sudah memiliki NPWPD.	Kepemilikan NPWPD mewajibkan pemilik restoran untuk membayar pajak secara rutin, yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.	Logis

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
Kepatuhan Pajak → Perhitungan pajak yang sesuai menunjukkan Perhitungan pajaktransparansi dan kejujuran wajib pajak dalam restoran yang sayamelaporkan pendapatan serta menghitung jumlah kelola selalu sesuai pajak yang harus dibayarkan. tanpa ada pengurangan nominal.		Logis
Kepatuhan Pajak → Pembayaran tepat waktu menunjukkan kedisiplinan Pembayaran pajakdan kepatuhan wajib pajak terhadap tenggat waktu restoran yang sayayang ditetapkan oleh otoritas pajak. kelola selalu saya lakukan tepat waktu.		Logis
Kepatuhan Pajak → Keselarasan antara jumlah pajak yang dilaporkan Jumlah perhitungandalam SPT dan yang dibayarkan mencerminkan pajak restoran pada kepatuhan penuh wajib pajak dalam memenuhi pelaporan SPT harus kewajiban perpajakannya. sesuai dengan jumlah yang saya bayarkan.		Logis

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
Kepatuhan Pajak → Saya selalu membayar pajak restoran serta tidak menganggap pembayaran ini sebagai beban tambahan di luar pajak lain yang saya sudah bayarkan atau mengurangi penghasilan.	Menganggap pembayaran pajak sebagai kewajiban yang tidak membebani menunjukkan sikap positif terhadap pajak dan kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	Logis

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber untuk pengembangan Disertasi (2024)

5.4.4. Uji Reflektif Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi

Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat kelogisan indikasi dari variabel reflektif dengan variabelnya.

Tabel 5. 22 Hubungan Logika Semantik Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi → Perhitungan pajak restoran yang saya kelola akan lebih mudah jika terintegrasi dengan perhitungan pajak otomatis <i>e-commerce</i> .	Integrasi perhitungan pajak otomatis dengan platform <i>e-commerce</i> mempermudah wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, meningkatkan akurasi dan efisiensi.	Logis

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi → Pembayaran pajak restoran yang terintegrasi dengan <i>e-commerce</i> akan memudahkan saya dalam membayarkan pajak restoran.	Integrasi sistem pembayaran pajak dengan <i>e-commerce</i> memudahkan pemilik restoran untuk memenuhi kewajiban pajak secara cepat dan efisien, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.	Logis
Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi → Kemudahan perhitungan pembayaran pajak restoran yang terintegrasi dengan teknologi <i>e-commerce</i> akan memudahkan saya untuk membayar pajak restoran dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu.	Pemanfaatan teknologi <i>e-commerce</i> yang terintegrasi dalam proses perhitungan dan pembayaran pajak memastikan pembayaran dilakukan dengan jumlah yang akurat dan sesuai jadwal, mendorong kepatuhan pajak.	Logis

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi → Menurut saya proses pembuatan NPWPD restoran, sehingga untuk usaha restoran yang saya kelola dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat dengan pemanfaatan teknologi.	Teknologi dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pembuatan NPWPD, membuatnya lebih mudah diakses oleh pengusaha restoran, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.	Logis
Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi → Menurut saya dalam perhitungan pajak restoran yang menyulitkan dapat dipermudah dengan pemanfaatan teknologi untuk perhitungan otomatis jumlah pajak yang dibayarkan.	Penggunaan teknologi dalam perhitungan pajak otomatis mengurangi kesalahan dan kompleksitas dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga memudahkan pemilik restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.	Logis

Variabel	Hubungan Logika Semantik	Indikasi
Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi → Pembayaran pajak restoran yang saya kelola dapat dipermudah dengan portal pajak satu pintu yang mudah diakses.	Portal pajak satu pintu menyediakan akses mudah untuk berbagai layanan perpajakan, termasuk pembayaran, sehingga mempermudah pemilik restoran dalam melaksanakan kewajiban pajak.	Logis
Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi → Pelaporan pajak restoran yang saya kelola dapat dipermudah dengan pemanfaatan teknologi seperti formulir elektronik.	Teknologi seperti formulir elektronik memungkinkan pelaporan pajak dilakukan dengan cepat dan efisien, mengurangi kesalahan dan mempercepat proses pelaporan.	Logis

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber untuk pengembangan Disertasi (2024)

5.5. Analisis Statistik Inferensial

Langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah melakukan analisis statistik inferensial untuk menguji hubungan antar konstruk dalam model penelitian. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual yang terjadi di lapangan serta memberikan hasil pengukuran yang akurat terkait

pengaruh variabel- variabel seperti *e-commerce*, *self assessment system*, dan pengawasan pajak berbasis teknologi terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran berbasis *e-commerce* GoFood di Kota Semarang.

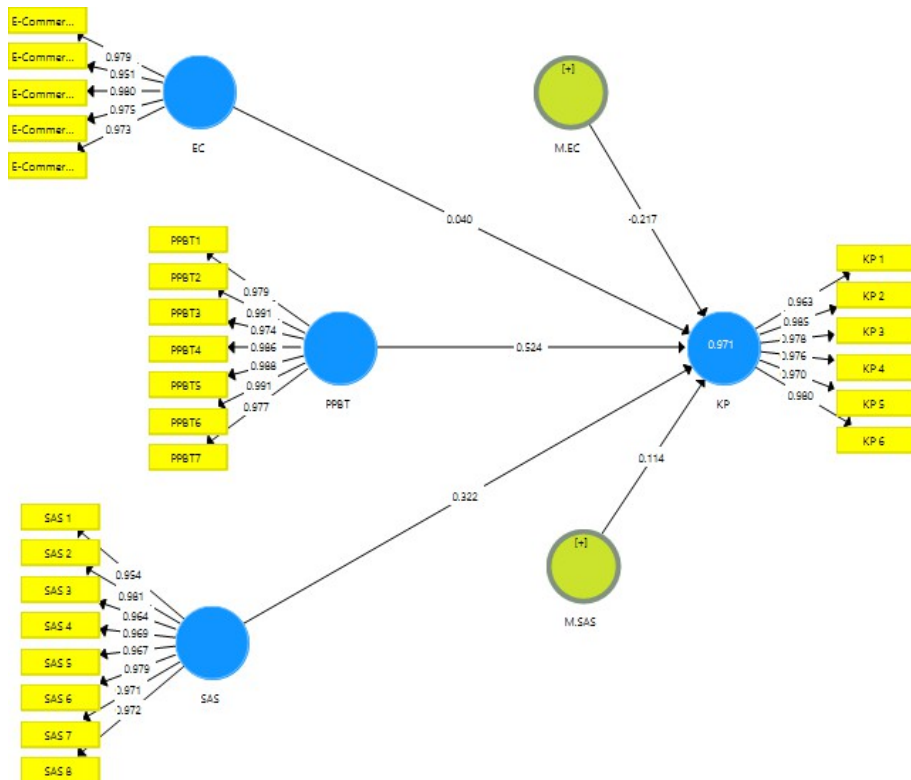
Untuk melakukan analisis ini, digunakan *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan bantuan software SmartPLS. SEM dipilih karena mampu menguji hubungan multivariat antara variabel-variabel penelitian yang kompleks secara simultan, termasuk pengaruh langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, SEM memfasilitasi pengujian interaksi antara pemerintah, industri (restoran *e-commerce*), dan akademisi dalam mempengaruhi kepatuhan pajak restoran.

5.5.1. Analisis Model Pengukuran

Analisis model pengukuran bertujuan untuk mengevaluasi validitas, reliabilitas dan diskriminan dari konstruk yang digunakan dalam penelitian.

5.5.1.1. Pengujian Validitas Konvergen

Validitas konvergen mengukur sejauh mana indikator-indikator yang seharusnya mengukur konstruk yang sama, memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Untuk menilai validitas konvergen, dilakukan pengujian terhadap nilai *loading factor*. Nilai *loading factor* untuk setiap indikator harus lebih besar dari 0,7. Indikator dengan nilai loading factor di bawah 0,7 harus dipertimbangkan untuk dihapus dari model. Nilai AVE untuk setiap konstruk harus lebih besar dari 0,5. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk tersebut. Gambar 4.1 di bawah menunjukkan bahwa nilai faktor loading untuk masing-masing konstruk telah sesuai persyaratan SEM-PLS dan memiliki nilai di atas 0,5.



Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Gambar 5. 1 Uji *Outer Loading*

Validitas konvergen adalah aspek penting dalam mengukur sejauh mana indikator-indikator dari suatu konstruk mampu bersama-sama menjelaskan varians yang dimiliki oleh konstruk tersebut. Menurut Hair et al. (2019), validitas konvergen dapat dinilai melalui dua indikator utama, yaitu nilai *outer loading* dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Pertama, indikator-indikator yang memiliki nilai *outer loading* $\geq 0,50$ dianggap memadai, karena menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki kontribusi yang cukup dalam menjelaskan konstruk yang diukur. Kedua, nilai AVE $\geq 0,50$ menunjukkan bahwa secara keseluruhan, konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians dari indikator-indikatornya, yang berarti validitas konvergen secara umum terpenuhi. Berikut adalah hasil validitas konvergen untuk setiap variabel dalam penelitian ini:

1. Uji validitas konvergen berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Tabel 5. 23 Validitas Konvergen semua variabel

Variabel	<i>AVE</i>)	Keterangan
<i>E-Commerce</i>	0.944	<i>Valid</i>
Kepatuhan Pajak	0.951	<i>Valid</i>
Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi	0.967	<i>Valid</i>
<i>Self Assesment System</i>	0.940	<i>Valid</i>

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan tabel 5.23, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai AVE melebihi ambang batas minimum sebesar 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan dapat digunakan dalam analisis model struktural pada tahap selanjutnya.

2. Uji validitas berdasarkan nilai *outer loading* Variabel *E-Commerce*

Tabel 5. 24 Validitas Konvergen *E-Commerce*

Variabel	<i>Outer Loading</i>	Batas Nilai	Keterangan
<i>E-Commerce 1</i>	0.979	0.700	<i>Valid</i>
<i>E-Commerce 2</i>	0.951	0.700	<i>Valid</i>
<i>E-Commerce 3</i>	0.980	0.700	<i>Valid</i>
<i>E-Commerce 4</i>	0.975	0.700	<i>Valid</i>
<i>E-Commerce 5</i>	0.973	0.700	<i>Valid</i>

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan Tabel 5.24 yang menunjukkan hasil validitas konvergen untuk variabel *E-Commerce*, dapat dilihat bahwa semua indikator memiliki nilai *outer loading* yang sangat tinggi, yaitu di atas 0,950. Nilai *outer loading* ini jauh

melampaui batas nilai yang ditetapkan sebesar 0,700, yang menunjukkan bahwa masing-masing indikator dari variabel *E-Commerce* memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan konstruk yang diukur.

Secara keseluruhan, seluruh indikator *E-Commerce* dalam penelitian ini dianggap valid, sehingga dapat diandalkan untuk menggambarkan variabel *E-Commerce* secara akurat. Implikasi dari hasil ini terhadap hipotesis penelitian adalah bahwa konstruk E-Commerce dalam model penelitian memiliki validitas yang sangat kuat, sehingga dapat dipercaya dalam menguji hubungan dengan variabel lain.

3. Uji validitas berdasarkan nilai *outer loading* Variabel *Self Assessment System*

Tabel 5. 25 Validitas Konvergen *Self Assessment System*

Variabel	<i>Outer Loading</i>	Batas Nilai	Keterangan
SAS 1	0.954	0.700	<i>Valid</i>
SAS 2	0.981	0.700	<i>Valid</i>
SAS 3	0.964	0.700	<i>Valid</i>
SAS 4	0.969	0.700	<i>Valid</i>
SAS 5	0.967	0.700	<i>Valid</i>
SAS 6	0.979	0.700	<i>Valid</i>
SAS 7	0.971	0.700	<i>Valid</i>
SAS 8	0.972	0.700	<i>Valid</i>

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan Tabel 5.25 yang menyajikan hasil validitas konvergen untuk variabel *Self Assessment System* (SAS), semua indikator menunjukkan nilai *outer loading* yang sangat tinggi, yaitu di atas 0,954. Nilai-nilai ini secara signifikan

melampaui batas minimum yang ditetapkan sebesar 0,700, menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki kekuatan yang cukup dalam menjelaskan konstruk SAS. Validitas konvergen dari variabel ini dapat dianggap sangat baik, karena semua indikator valid dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Implikasi terhadap hipotesis penelitian adalah bahwa variabel SAS dapat diandalkan dalam menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak restoran berbasis e-commerce. Hasil ini memperkuat peran sistem penilaian mandiri dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi kepatuhan pajak, serta mendukung keabsahan model penelitian.

4. Uji validitas berdasarkan nilai *outer loading* Variabel Kepatuhan Pajak

Tabel 5. 26 Validitas Konvergen Kepatuhan Pajak

Variabel	<i>Outer Loading</i>	Batas Nilai	Keterangan
KP 1	0.963	0.700	<i>Valid</i>
KP 2	0.985	0.700	<i>Valid</i>
KP 3	0.978	0.700	<i>Valid</i>
KP 4	0.976	0.700	<i>Valid</i>
KP 5	0.970	0.700	<i>Valid</i>
KP 6	0.980	0.700	<i>Valid</i>

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan Tabel 5.26 yang menampilkan hasil validitas konvergen untuk variabel Kepatuhan Pajak (KP), dapat dilihat bahwa semua indikator memiliki nilai *outer loading* yang sangat tinggi, yaitu di atas 0,963. Nilai-nilai ini jauh melampaui batas minimum sebesar 0,700, yang menunjukkan bahwa setiap indikator memberikan kontribusi yang kuat dalam menjelaskan konstruk KP. Hal

ini menandakan bahwa validitas konvergen untuk variabel ini sangat baik, di mana semua indikator valid dalam mengukur variabel Kepatuhan Pajak secara akurat.

Implikasi terhadap hipotesis penelitian adalah bahwa variabel Kepatuhan Pajak dapat diandalkan dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, termasuk e-commerce, *self assessment system*, dan pengawasan pajak berbasis teknologi. Hasil ini mendukung relevansi model penelitian serta memperkuat kesimpulan bahwa kepatuhan pajak yang tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diukur dalam penelitian ini.

5. Uji validitas berdasarkan nilai *outer loading* Variabel Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi

Tabel 5. 27 Validitas Konvergen Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi

Variabel	<i>Outer Loading</i>	Batas Nilai	Keterangan
PPBT1	0.979	0.700	<i>Valid</i>
PPBT2	0.991	0.700	<i>Valid</i>
PPBT3	0.974	0.700	<i>Valid</i>
PPBT4	0.986	0.700	<i>Valid</i>
PPBT5	0.988	0.700	<i>Valid</i>
PPBT6	0.991	0.700	<i>Valid</i>
PPBT7	0.977	0.700	<i>Valid</i>

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan Tabel 5.27 yang menyajikan hasil validitas konvergen untuk variabel Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi (PPBT), seluruh indikator yang digunakan memiliki nilai *outer loading* yang sangat tinggi, dengan rentang antara

0,974 hingga 0,991. Nilai ini jauh melampaui batas minimum 0,700, yang merupakan ambang batas untuk validitas konvergen. Dapat disimpulkan seluruh indikator valid dan dapat menjelaskan variabel Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi, sehingga konstruk ini memiliki validitas konvergen yang sangat baik dalam model penelitian.

Implikasi terhadap hipotesis penelitian adalah bahwa variabel PPBT memiliki kontribusi yang kuat dalam mengukur efektivitas pengawasan pajak digital. Dengan validitas konvergen yang tinggi, hasil penelitian dapat lebih meyakinkan dalam menguji pengaruh PPBT terhadap kepatuhan pajak. Hal ini juga memperkuat argumentasi bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pajak berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak di ekosistem e-commerce.

5.5.1.2. Pengujian Discriminant Validity

Pengujian diskriminan atau *discriminant validity* bertujuan untuk memastikan bahwa konstruk yang berbeda dalam model penelitian dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak saling tumpang tindih. Validitas diskriminan mengukur sejauh mana sebuah konstruk berbeda dari konstruk lainnya dalam model. Ada dua metode umum untuk menguji validitas diskriminan: *Fornell-Larcker Criterion* dan *HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio)*. Metode *Fornell-Larcker Criterion* menyatakan bahwa nilai akar kuadrat dari *Average Variance Extracted (AVE)* dari setiap konstruk harus lebih besar dari korelasi antar konstruk lainnya. Dengan kata lain, setiap konstruk harus menjelaskan lebih banyak varians dalam indikatornya sendiri dibandingkan dengan varians yang dijelaskan oleh konstruk lain. Berikut hasil dari uji validitas diskriminan dari penelitian ini:

Tabel 5. 28 Cross Loading

	EC	KP	PPBT	SAS
<i>E-Commerce 1</i>	(0.979)	0.940	0.937	0.945
<i>E-Commerce 2</i>	(0.951)	0.887	0.889	0.891
<i>E-Commerce 3</i>	(0.980)	0.942	0.943	0.948
<i>E-Commerce 4</i>	(0.975)	0.929	0.943	0.933
<i>E-Commerce 5</i>	(0.973)	0.942	0.949	0.965
KP 1	0.935	(0.963)	0.940	0.941
KP 2	0.941	(0.985)	0.964	0.961
KP 3	0.932	(0.978)	0.965	0.960
KP 4	0.929	(0.976)	0.947	0.958
KP 5	0.914	(0.970)	0.945	0.940
KP 6	0.940	(0.980)	0.966	0.949
PPBT1	0.951	0.964	(0.979)	0.954
PPBT2	0.952	0.961	(0.991)	0.958
PPBT3	0.928	0.948	(0.974)	0.943
PPBT4	0.946	0.970	(0.986)	0.969
PPBT5	0.948	0.967	(0.988)	0.957
PPBT6	0.953	0.968	(0.991)	0.961
PPBT7	0.929	0.958	(0.977)	0.943
SAS 1	0.930	0.935	0.948	(0.954)
SAS 2	0.938	0.944	0.949	(0.981)
SAS 3	0.931	0.932	0.917	(0.964)

SAS 4	0.943	0.957	0.956	(0.969)
SAS 5	0.921	0.944	0.950	(0.967)
SAS 6	0.941	0.950	0.933	(0.979)
SAS 7	0.931	0.950	0.941	(0.971)
SAS 8	0.942	0.954	0.940	(0.972)

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Tabel 5.29 menunjukkan nilai *cross loading* untuk item-item yang terkait dengan konstruk *E-Commerce*, *Self Assessment System* (SAS), Kepatuhan Pajak (KP), dan Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi (PPBT). Tabel ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai loading item yang secara konsisten lebih tinggi pada konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya, yang menandakan validitas diskriminan yang baik. Misalnya, *E-Commerce* memiliki nilai loading antara 0.951 hingga 0.980, SAS berkisar antara 0.930 hingga 0.972,

KP antara 0.914 hingga 0.985, dan PPBT antara 0.928 hingga 0.991. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas diskriminan yang memadai, dengan loading item yang tinggi pada konstruk yang relevan dan rendah pada konstruk lain, mendukung keandalan dan ketepatan pengukuran dalam penelitian.

Tabel 5. 29 Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

	EC	KP	PPBT	SAS
EC				
KP	0.891			
PPBT	0.866	0.841		
SAS	0.852	0.860	0.878	

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Tabel 5.30 menunjukkan hasil analisis Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) untuk menguji validitas diskriminan antar konstruk dalam model. Semua nilai HTMT berada di bawah batas toleransi 0,90, sesuai dengan kriteria Hair et al. (2017), yang mengindikasikan validitas diskriminan terpenuhi. Nilai tertinggi terdapat pada pasangan konstruk SAS dan SAS*PPBT (0,900), sementara nilai terendah pada pasangan EC*PPBT dan KP (0,812). Hasil ini menunjukkan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki perbedaan yang memadai, mendukung keandalan model penelitian.

Implikasi terhadap hipotesis penelitian adalah bahwa validitas diskriminan yang baik memastikan bahwa setiap variabel dalam model dapat diukur secara terpisah tanpa adanya bias antar konstruk. Hal ini memperkuat keakuratan analisis hubungan antar variabel, memungkinkan pengujian hipotesis yang lebih valid, serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian terkait kepatuhan pajak restoran berbasis e-commerce.

5.5.1.3. Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah langkah penting untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Reliabilitas mengukur sejauh mana instrumen penelitian menghasilkan hasil yang stabil dalam kondisi yang berbeda dan dari waktu ke waktu. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas, antara lain *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability (CR)*, dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Dasar penentuan suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,7 (Hair et al., 2019). Selain itu nilai *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,7 agar dapat dinyatakan reliabel

(Hair et al., 2019). Berikut hasil dari uji reliabilitas dari penelitian ini:

Tabel 5. 30 Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>rho_A</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Keterangan
EC	(0.985)	0.986	0.988	0.944	reliabel
KP	(0.990)	0.990	0.992	0.951	reliabel
EC*PPBT		1.000			reliabel
SAS*PPBT	(1.000)	1.000	1.000	1.000	reliabel
PPBT	(0.994)	0.994	0.995	0.967	reliabel
SAS	(0.991)	0.991	0.992	0.940	reliabel

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Tabel 5.31 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk berbagai konstruk dalam penelitian ini. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan empat indikator utama: *Cronbach's Alpha*, *rho_A*, *Composite Reliability*, dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Semua konstruk menunjukkan nilai yang sangat tinggi pada semua indikator. Nilai *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0,985 hingga 1,000, yang menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik. Nilai *Composite Reliability* juga sangat tinggi, yaitu antara 0,988 hingga 1,000, menandakan bahwa konstruk-konstruk ini sangat dapat diandalkan.

Nilai AVE yang tinggi, semuanya di atas 0,940, menunjukkan bahwa sebagian besar variansi indikator dijelaskan oleh konstruk yang bersangkutan. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini reliabel dan

alat ukur yang digunakan memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya.

Implikasi terhadap hipotesis penelitian adalah bahwa reliabilitas yang tinggi memastikan bahwa konstruk dalam model penelitian memiliki konsistensi internal yang kuat, sehingga hasil pengukuran dapat diandalkan dalam menguji hubungan antar variabel. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuji dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, memperkuat validitas temuan, serta memberikan dasar yang kokoh bagi pengambilan keputusan terkait kepatuhan pajak restoran berbasis e-commerce.

5.5.2. Hasil Analisis Model Struktural

5.5.2.1. Uji R Square

R-squared (R^2) adalah salah satu metode untuk mengukur seberapa baik variabilitas variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel eksogen dalam model. Nilai *R-squared* berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin baik model dalam menjelaskan variabilitas variabel endogen.

Tabel 5. 31 Nilai *R Square*

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
KP	0.971	0.969

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Berdasarkan Tabel 5.32 menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0.971 mengindikasikan bahwa 97,1% variasi dalam konstruk Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada dalam model penelitian.

Sementara itu, *R Square Adjusted* yang bernilai 0.969 menunjukkan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dalam model, yang tetap mempertahankan kontribusi penjelasan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 96,9%.

Dengan nilai yang mendekati 1, kedua indikator ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variabilitas konstruk Kepatuhan Pajak, memperkuat validitas model yang digunakan dalam penelitian ini.

Implikasinya, hasil ini mendukung hipotesis penelitian dengan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti e-commerce, *self assessment system*, dan pengawasan pajak berbasis teknologi berkontribusi signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini memperkuat dasar empiris penelitian serta memberikan implikasi bagi kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

5.5.2.2. Effect Size (F^2)

Analisis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi. F^2 memberikan informasi tambahan mengenai seberapa besar peran variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen, dengan mempertimbangkan pengaruh dari variabel lain yang ada dalam model.

Tabel 5. 32 Nilai F Square

	EC	KP	EC*PPBT	SAS*PPBT	PPBT	SAS
EC		0.002				
KP						
EC*PPBT		0.043				
SAS*PPBT		0.015				
PPBT		0.426				
SAS		0.129				

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Tabel 5.33 menunjukkan bahwa *E-Commerce* (EC) memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap Kepatuhan Pajak (KP) dengan nilai F Square sebesar

0.002. Moderasi EC*PPBT dan SAS*PPBT juga memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap KP, dengan nilai masing-masing 0.043 dan 0.015. Sebaliknya, Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi (PPBT) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap KP dengan nilai F Square sebesar 0.426, menjadikannya faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. *Self Assessment System* (SAS) juga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap KP dengan nilai F Square sebesar 0.129, yang masih tergolong cukup signifikan. Secara keseluruhan, PPBT menjadi variabel yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak, diikuti oleh SAS, sementara pengaruh moderasi dan EC relatif lebih kecil.

Implikasinya, temuan ini mendukung hipotesis bahwa penerapan teknologi dalam pengawasan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, meskipun SAS juga berpengaruh signifikan, efektivitas EC sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih terbatas. Hasil ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang lebih menitikberatkan pada optimalisasi sistem pengawasan berbasis teknologi dan perbaikan mekanisme *self assessment system*.

5.5.2.3. Predictive Relevance (Q²)

Q², atau yang dikenal sebagai *Stone-Geisser*, adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan prediksi model dalam analisis struktural. Nilai Q² dihitung untuk menentukan apakah model yang digunakan memiliki relevansi prediktif yang memadai. Rumus untuk menghitung Q² adalah:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$$

Di mana R^2 , R^2 ... R_p^2 adalah *R-square* dari variabel eksogen dalam model. Jika $Q^2 > 0$, model memiliki predictive relevance; jika $Q^2 < 0$, model kurang memiliki *predictive relevance* (Ghozali dan Latan, 2015).

Dalam penelitian ini, nilai *R-square* untuk variabel "Kepatuhan Pajak" (KP) adalah 0.971, dan nilai *R-square adjusted* adalah 0.969. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan nilai *R-square* tersebut, hasilnya adalah:

$$Q^2 = 1 - (1 - 0.971)$$

$$Q^2 = 1 - 0.029$$

$$Q^2 \approx 0.971$$

Nilai Q^2 yang mencapai 0.971 menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki relevansi prediktif yang sangat tinggi. Hal ini berarti model ini mampu memprediksi variabel dependen, yaitu "Kepatuhan Pajak," dengan sangat baik berdasarkan variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian.

5.5.2.4. Goodness of Fit Index (GoF)

Goodness of Fit Index (GoF) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesesuaian keseluruhan model dalam analisis PLS-SEM (*Partial Least Squares Structural Equation Modeling*). GoF dihitung untuk mengevaluasi seberapa baik model penelitian yang digunakan sesuai dengan data yang dikumpulkan.

$$\text{Rata-rata AVE} = \frac{0.944 + 0.951 + 0.967 + 0.940}{4} = \frac{3.802}{4} = 0.9505$$

$$\text{Rata-rata } R^2 = 0.971$$

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{Rata-rata AVE} \times \text{Rata-rata } R^2}$$

$$\text{GoF} = \sqrt{0.9505 \times 0.971} = \sqrt{0.922} \approx 0.9602$$

Nilai *Goodness of Fit Index* (GoF) sebesar 0.9602 menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik dengan data. Nilai GoF yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kualitas prediksi dan kesesuaian yang sangat kuat dalam penelitian ini. Dengan demikian, model penelitian ini dapat dianggap andal dan relevan dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

5.6. Pengujian Kausalitas dan Hipotesis

Pengujian kausalitas dan hipotesis yakni melakukan uji statistik untuk menentukan apakah hubungan kausal antara variabel-variabel independen dan dependen sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil uji hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari nilai koefisien jalur (*path coefficients*), nilai t-statistik melalui prosedur *bootstrapping* dan *p-value*.

Tabel 5. 33 Hasil Uji Hipotesis

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
EC -> KP	0.040	0.052	0.086	0.462	0.645
EC*PPBT -> KP	-0.217	-0.222	0.105	2.055	0.040
SAS*PPBT -> KP	0.114	0.120	0.082	1.386	0.166
PPBT -> KP	0.524	0.521	0.104	5.035	0.000
SAS -> KP	0.322	0.311	0.124	2.603	0.010

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Keterangan:

EC : *e-commerce*

KP : Kepatuhan Pajak

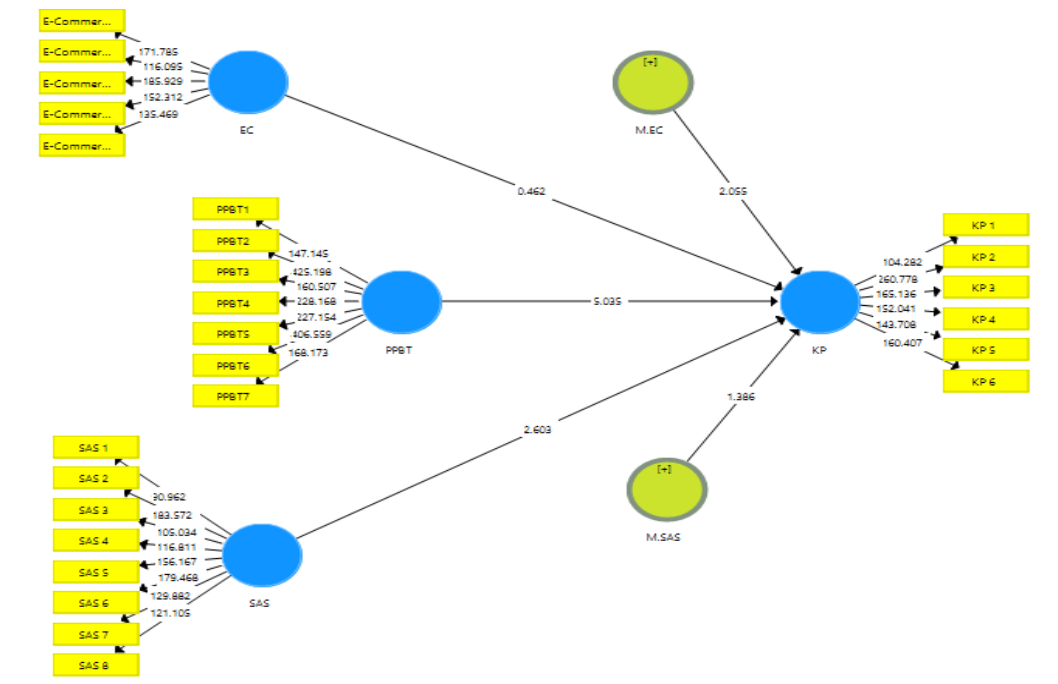
EC*PPBT : Moderasi *e-commerce* dengan Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi

SAS*PPBT : Moderasi *Self Assessment System* dengan Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi

PPBT : Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi

Menurut Hair et al. (2017), salah satu prosedur penting dalam pengujian statistik inferensial adalah *bootstrapping*. Teknik ini digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antar konstruk dalam model struktural dan memastikan akurasi dari estimasi parameter. Prosedur *bootstrapping* memungkinkan pengujian ulang sampel data secara berulang-ulang (dengan mengganti data secara acak) guna menghasilkan distribusi dari estimasi parameter yang lebih kuat dan tidak bergantung pada asumsi distribusi normal.

Bootstrapping digunakan untuk menilai signifikansi statistik dalam pengujian hipotesis. Prosedur ini dapat memberikan informasi apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan nilai t-statistik dan *p-value* yang dihasilkan dari analisis model. Hair et al. (2017) menyarankan bahwa pengujian hipotesis melalui *bootstrapping* didasarkan pada *critical value* dari *alpha* 0,05, yang berarti tingkat signifikansi 5%. Dalam pengujian ini, nilai t-statistik dianggap signifikan jika lebih besar dari 1,645 (untuk uji satu arah) dan *p-value* harus lebih kecil dari 0,05.



Gambar 5. 2 Model Final (*Bootstrapping*)

Berdasarkan hasil analisis jalur yang ditunjukkan pada Gambar 5.2, nilai koefisien jalur berkisar antara -1 hingga +1. Nilai koefisien yang mendekati +1 menunjukkan adanya pengaruh positif yang kuat antara variabel, sementara nilai yang mendekati -1 mengindikasikan pengaruh negatif yang kuat. Metode *bootstrapping* digunakan untuk menilai tingkat signifikansi dari efek langsung, tidak langsung, dan total. Hasil pengujian koefisien jalur menggunakan *bootstrapping* menunjukkan bahwa ada delapan jalur yang menunjukkan pengaruh positif, ditandai dengan nilai koefisien yang mendekati +1 dan t-statistik yang lebih besar dari 1,645, menandakan bahwa hubungan antara konstruk tersebut signifikan. Sebaliknya, terdapat dua jalur dengan pengaruh negatif (mendekati -1), dan nilai t-statistik di bawah 1,645, yang menunjukkan bahwa hubungan antara konstruk tersebut tidak signifikan.

5.6.1. Pengujian Langsung

5.6.1.1. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah sistem pembayaran pajak pada platform *e-commerce* untuk restoran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang. Berikut ini adalah hipotesis yang diuji:

H1: $P > 0$	1. H1: Semakin baik sistem pembayaran pajak pada platform <i>e-commerce</i> untuk restoran, maka semakin meningkat kepatuhan pajak wajib pajak restoran di Kota Semarang.	2. Terima H1 jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ (1,645) atau $p \text{ value} \leq 0,05$. 3. Tolak H1 jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ (1,645) atau $p \text{ value} > 0,05$.
-------------	---	---

Tabel 5. 34 Hasil Pengujian Hipotesis 1

Koefisien Jalur	T Hitung	T Tabel	$P \text{ value}$	H1
0.040	0.462	1.645	0.645	Ditolak

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Hasil pengujian tabel 5.35 menunjukkan bahwa koefisien jalur untuk pengaruh sistem pembayaran pajak pada platform *e-commerce* terhadap kepatuhan pajak restoran adalah sebesar 0,040 dengan arah pengaruh positif. Artinya, peningkatan dalam efektivitas sistem pembayaran pajak melalui platform *e-commerce* cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak restoran.

Namun, nilai $t \text{ hitung}$ sebesar 0,462 lebih kecil dari $t \text{ tabel}$ sebesar 1,645, dan $p \text{ value}$ sebesar 0,645 menunjukkan bahwa pengaruh ini tidak signifikan pada tingkat kesalahan 5%. Karena nilai $t \text{ hitung}$ lebih kecil dibandingkan dengan $t \text{ tabel}$, maka pada tingkat kesalahan 5% H1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa sistem pembayaran pajak pada platform *e-commerce* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang.

5.6.1.2. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah proses *self assessment system* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah pelaksanaan *self assessment system* berperan dalam meningkatkan atau mengurangi kepatuhan pajak restoran.

H2: $P > 0$	4. H2: <i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang.	5. Terima H2 jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ (1,645) atau $p \text{ value} \leq 0,05$. 6. Tolak H2 jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ (1,645) atau $p \text{ value} > 0,05$.
-------------	--	---

Tabel 5. 35 Hasil Pengujian Hipotesis 2

Koefisien Jalur	T Hitung	T Tabel	<i>P value</i>	H2
0.322	2.603	1.645	0.010	Diterima

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Hasil pengujian tabel 5.36 menunjukkan bahwa koefisien jalur untuk pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang adalah sebesar 0,322. Nilai $t \text{ hitung}$ sebesar 2,603 lebih besar dari $t \text{ tabel}$ sebesar 1,645, dengan $p \text{ value}$ sebesar 0,010. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak restoran adalah signifikan pada tingkat kesalahan 5%. Koefisien positif sebesar 0,322 mengindikasikan bahwa semakin baik proses *self assessment system*, maka

kepatuhan pajak restoran cenderung meningkat. Karena nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan t tabel dan p value lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang.Semarang.

5.6.1.3. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah pengawasan pajak restoran berbasis teknologi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah penerapan pengawasan pajak berbasis teknologi dapat meningkatkan kepatuhan pajak restoran.

H3: $P > 0$	7. H3: Pengawasan pajak berbasis teknologi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang.	8. Terima H3 jika t hitung $\geq t$ tabel (1,645) atau p value $\leq 0,05$. 9. Tolak H3 jika t hitung $< t$ tabel (1,645) atau p value $> 0,05$.
-------------	--	---

Tabel 5.36 Hasil Pengujian Hipotesis 3

Koefisien Jalur	T Hitung	T Tabel	P value	H3
0.524	5.035	1.645	0.000	Diterima

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Tabel 5.37 menunjukkan bahwa koefisien jalur untuk pengaruh pengawasan pajak restoran berbasis teknologi terhadap kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang adalah sebesar 0,524. Nilai t hitung sebesar 5,035 lebih besar dari t tabel sebesar 1,645, dengan p value sebesar 0,000. Hasil menunjukkan

bahwa pengaruh pengawasan pajak berbasis teknologi terhadap kepatuhan pajak restoran sangat signifikan pada tingkat kesalahan 5%. Koefisien positif sebesar 0,524 mengindikasikan bahwa semakin baik pengawasan pajak berbasis teknologi, maka kepatuhan pajak restoran meningkat. Karena nilai t hitung jauh lebih besar dibandingkan dengan t tabel dan p value sangat kecil (lebih kecil dari 0,05), maka pada tingkat kesalahan 5% diputuskan H_3 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak restoran berbasis teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

5.6.2. Pengujian Moderasi

Pengujian moderasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel moderasi dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang diuji adalah pengawasan pajak berbasis teknologi yang diasumsikan mampu memoderasi pengaruh antara *e-commerce* atau *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang.

5.6.2.1. Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat yang diuji dalam penelitian ini adalah apakah pengawasan pajak restoran berbasis teknologi mampu memoderasi pengaruh *e-commerce* terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang.

H4: $P > 0$	10.H4: Pengawasan pajak restoran berbasis teknologi mampu memoderasi peran <i>e-commerce</i> dalam meningkatkan kepatuhan pajak	11. Terima H4 jika t hitung $\geq t$ tabel (1,645) atau p value $\leq 0,05$. 12. Tolak H4 jika t hitung $< t$ tabel (1,645) atau p value $> 0,05$.
-------------	---	---

	wajib pajak restoran. Sehingga, semakin baik	
	pengawasan pajak berbasis teknologi akan semakin tinggi peran e-commerce dalam meningkatkan kepatuhan pajak.	

Tabel 5.37 Hasil Pengujian Hipotesis 4

Koefisien Jalur	T Hitung	T Tabel	<i>P value</i>	H4
-0.217	2.055	1.645	0.040	Ditolak

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Pengujian pada Tabel 5.38 menunjukkan bahwa koefisien jalur moderasi pengawasan pajak berbasis teknologi terhadap pengaruh *e-commerce* terhadap kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang adalah sebesar -0,217. Nilai t hitung sebesar 2,055 lebih besar dari t tabel sebesar 1,645, dan p value sebesar 0,040 menunjukkan bahwa moderasi ini signifikan pada tingkat kesalahan 5%. Namun, koefisien negatif sebesar -0,217 mengindikasikan bahwa pengawasan pajak berbasis teknologi tidak mendukung hipotesis H4.

Hipotesis awal menyatakan bahwa semakin baik pengawasan pajak berbasis teknologi, maka peran *e-commerce* dalam meningkatkan kepatuhan pajak restoran akan semakin kuat. Namun, hasil ini menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu pengawasan pajak berbasis teknologi justru memperlemah hubungan positif antara *e-commerce* dan kepatuhan pajak restoran. Oleh karena itu, meskipun moderasi signifikan, hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis H4 ditolak, karena

pengaruh moderasi tidak memperkuat hubungan sebagaimana yang diharapkan dalam hipotesis.

5.6.2.2. Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis kelima yang diuji dalam penelitian ini adalah apakah pengawasan pajak berbasis teknologi mampu memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang.

H5: $P > 0$	13.H5: Pengawasan pajak berbasis teknologi memoderasi pengaruh <i>self assessment system</i> terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang.	14. Terima H5 jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ (1,645) atau $p \text{ value} \leq 0,05$. 15. Tolak H5 jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ (1,645) atau $p \text{ value} > 0,05$.
-------------	--	---

Tabel 5.38 Hasil Pengujian Hipotesis 5

Koefisien Jalur	T Hitung	T Tabel	$P \text{ value}$	H5
0.114	1.386	1.645	0.166	Ditolak

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Hasil pengujian tabel 5.39 menunjukkan bahwa koefisien jalur untuk moderasi pengawasan pajak berbasis teknologi terhadap pengaruh *self assessment system* dan kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang adalah sebesar 0,114. Meskipun arah pengaruhnya positif, nilai $t \text{ hitung}$ sebesar 1.386 lebih kecil dari $t \text{ tabel}$ sebesar 1.645, dan $p \text{ value}$ sebesar 0.166 menunjukkan bahwa moderasi ini tidak signifikan pada tingkat kesalahan 5%. Karena nilai $t \text{ hitung}$ lebih kecil dari $t \text{ tabel}$ dan $p \text{ value}$ lebih besar dari 0,05, maka pada tingkat kesalahan 5% diputuskan

untuk menolak H4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak berbasis teknologi tidak memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang secara signifikan.

Hasil pengujian langsung menunjukkan bahwa sistem pembayaran pajak berbasis *e-commerce* belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang. Salah satu alasannya adalah masih banyak restoran yang belum siap secara teknis dan operasional dalam mengadopsi sistem ini, terutama restoran kecil yang masih mengandalkan metode manual. Kebijakan pemerintah yang mungkin kurang optimal dalam hal insentif dan sosialisasi juga berkontribusi terhadap rendahnya adopsi sistem ini oleh restoran.

Sementara itu, *self assessment system* dan pengawasan pajak berbasis teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Restoran yang terlibat dalam sistem *self assessment* cenderung lebih patuh karena adanya tanggung jawab langsung dan kesadaran terhadap risiko penalti. Namun, pada pengujian moderasi, pengawasan berbasis teknologi justru menghambat pengaruh *e-commerce*, karena kompleksitas teknologi yang mungkin membebani restoran yang kurang familiar dengan sistem digital.

5.6.2.3. Analisis Hubungan Antar Variabel

Analisis hubungan antar variabel dilakukan untuk menguji pengaruh langsung dan moderasi dari variabel bebas terhadap variabel kepatuhan pajak (KP). Metode yang digunakan adalah Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan pendekatan bootstrapping. Hasil lengkap pengujian disajikan pada Tabel 4.39.

Tabel 5. 39 Hubungan Moderasi Antar Variabel

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Signifikansi	Keputusan
H1	EC → KP	0,040	0,462	0,645	Tidak Signifikan	Ditolak
H2	SAS → KP	0,322	2,603	0,010	Signifikan	Diterima
H3	PPBT → KP	0,524	5,035	0,000	Signifikan	Diterima
H4	EC*PPBT → KP	-0,217	2,055	0,040	Signifikan	Ditolak
H5	SAS*PPBT → KP	0,114	1,386	0,166	Tidak Signifikan	Ditolak

Sumber: Data primer olah untuk disertasi (2024)

Penjelasan Tabel:

1. Koefisien Moderasi: Mengukur sejauh mana moderasi berpengaruh terhadap hubungan variabel independen dan dependen. Nilai positif menunjukkan penguatan hubungan.
2. Nilai t dan p-value: Menentukan signifikansi statistik ($p < 0,05$ dianggap signifikan).
3. Keterangan: Moderasi dianggap lemah, sedang, atau kuat berdasarkan nilai koefisien (0.1–0.3 lemah, 0.3–0.5 sedang, >0.5 kuat).

Tabel 4.39 menyajikan hasil analisis hubungan langsung dan moderasi antar variabel terhadap kepatuhan pajak (KP) menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Berdasarkan hasil analisis,

diketahui bahwa:

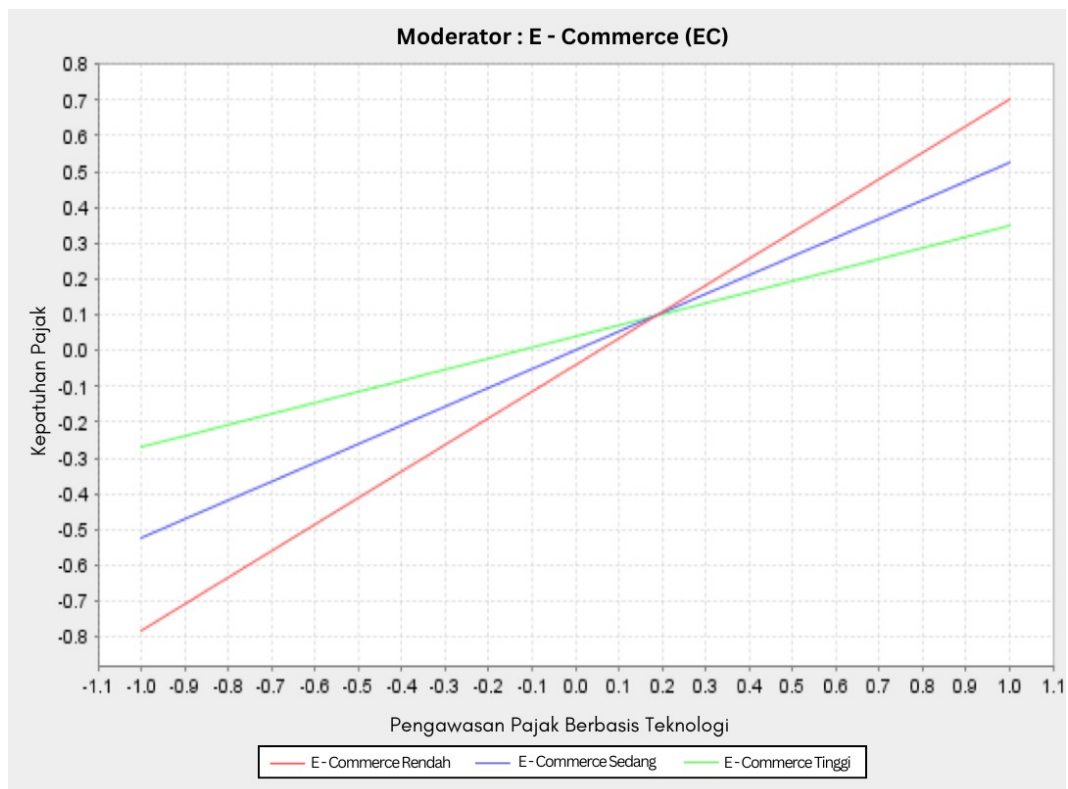
1. Hipotesis H1 ($EC \rightarrow KP$) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,040 dengan nilai T sebesar 0,462 dan p-value sebesar 0,645. Karena nilai $p > 0,05$, maka hubungan ini tidak signifikan dan hipotesis ditolak. Artinya, e-commerce tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.
2. Hipotesis H2 ($SAS \rightarrow KP$) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,322 dengan nilai T sebesar 2,603 dan p-value 0,010. Karena nilai $p < 0,05$, maka hubungan ini signifikan dan hipotesis diterima. Ini menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3. Hipotesis H3 ($PPBT \rightarrow KP$) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,524, nilai T sebesar 5,035, dan p-value 0,000. Karena p-value jauh di bawah 0,05, maka hubungan ini sangat signifikan. Dengan demikian, pengawasan pajak berbasis teknologi berpengaruh kuat terhadap peningkatan kepatuhan pajak.
4. Hipotesis H4 ($EC*PPBT \rightarrow KP$) sebagai bentuk interaksi moderasi antara e-commerce dan pengawasan pajak berbasis teknologi menunjukkan nilai koefisien -0,217, nilai T sebesar 2,055, dan p-value 0,040. Karena nilai $p < 0,05$, maka interaksi ini signifikan dan hipotesis ditolak. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa pengawasan pajak berbasis teknologi justru melemahkan pengaruh e-commerce terhadap kepatuhan pajak.
5. Hipotesis H5 ($SAS*PPBT \rightarrow KP$) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,114 dengan nilai T sebesar 1,386 dan p-value sebesar 0,166. Karena nilai $p > 0,05$, maka hubungan ini tidak signifikan dan hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara sistem self assessment dan pengawasan berbasis teknologi tidak cukup kuat untuk memoderasi hubungan terhadap kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, dari lima hipotesis yang diuji, dua di antaranya diterima dan tiga hipotesis ditolak berdasarkan tingkat signifikansi statistik yang digunakan.

5.6.2.4. Grafik Koeffisien Moderasi

Berikut adalah interpretasi grafik:

1. Pengaruh Moderasi *e-commerce* terhadap Kepatuhan Pajak ($EC*PPBT \rightarrow KP$)



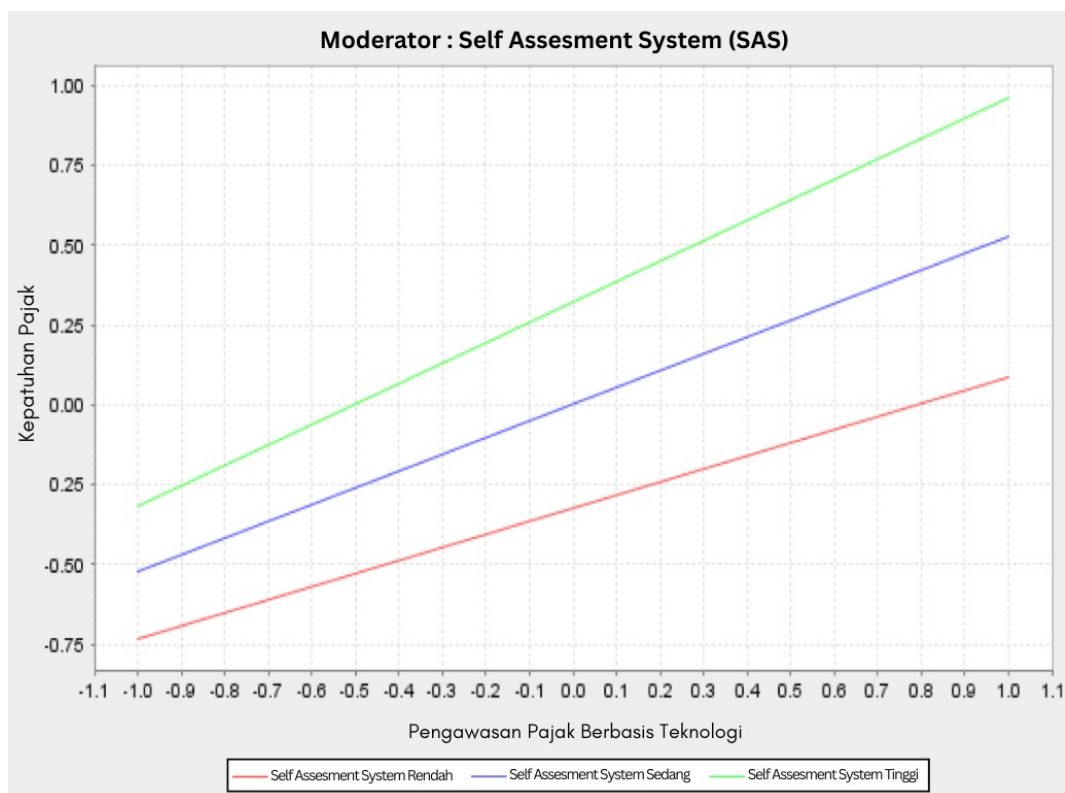
Gambar 5. 3 Koefisien Jalur $EC*PPBT \rightarrow KP$

Gambar 5.3 menunjukkan grafik interaksi antara e-commerce (EC) dan pengawasan pajak berbasis teknologi (PPBT) terhadap kepatuhan pajak (KP), yang direpresentasikan dalam bentuk efek moderasi $EC*PPBT \rightarrow KP$. Terdapat tiga garis yang menggambarkan hubungan PPBT terhadap KP pada kondisi EC yang berbeda, yaitu saat EC rendah (garis merah, -1 SD), EC rata-rata (garis biru), dan EC tinggi (garis hijau, +1 SD). Grafik ini memperlihatkan bahwa ketika

nilai EC rendah, hubungan antara PPBT dan KP justru semakin kuat, ditandai dengan kemiringan garis merah yang lebih curam.

Sebaliknya, ketika EC berada pada tingkat tinggi, hubungan tersebut menjadi lebih landai, seperti terlihat pada garis hijau. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi antara EC dan PPBT menghasilkan moderasi negatif, di mana pengaruh positif e-commerce terhadap kepatuhan pajak menjadi melemah ketika digabungkan dengan pengawasan berbasis teknologi. Hasil ini juga didukung oleh analisis statistik yang menunjukkan bahwa koefisien moderasi bernilai negatif sebesar -0,217, dengan T-statistics sebesar 2,055 dan P-value 0,040, sehingga pengaruh moderasi ini signifikan namun bersifat lemah.

2. Pengaruh Moderasi *Self assessment System* terhadap Kepatuhan Pajak (SAS*PPBT → KP)



Gambar 5. 4 Koefisien Jalur SAS*PPBT → KP

Gambar 5.4 menggambarkan hubungan moderasi antara Self Assessment System (SAS) terhadap pengaruh pengawasan pajak berbasis teknologi (PPBT) terhadap kepatuhan pajak (KP). Terdapat tiga garis yang menunjukkan efek PPBT terhadap KP pada tingkat SAS yang berbeda, yaitu rendah (garis merah), rata-rata (garis biru), dan tinggi (garis hijau). Ketiga garis tersebut memiliki arah positif dan hampir sejajar, yang mengindikasikan bahwa peningkatan PPBT cenderung meningkatkan kepatuhan pajak secara konsisten, tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat Self Assessment System. Meskipun secara visual terdapat perbedaan kecil dalam kemiringan garis, hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa efek moderasi ini tidak signifikan, dengan nilai koefisien sebesar 0,114, T-statistics sebesar 1,386, dan P-value sebesar 0,166.

5.7. Pembahasan dan Kesimpulan Hipotesis Penelitian

Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SmartPLS terhadap lima hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria yang baik. Berdasarkan pengujian, hipotesis yang diajukan telah memberikan hasil yang beragam. Penjelasan dan analisis secara rinci dari masing-masing hipotesis diuraikan sebagai berikut:

5.7.1. E-Commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat koefisien jalur positif, pengaruh sistem pembayaran pajak berbasis *e-commerce* terhadap kepatuhan pajak restoran di Kota Semarang tidak signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti kesadaran wajib pajak dan efektivitas proses *self assessment* yang belum optimal. Melengkapi hasil pengujian, peneliti menemukan penjelasan dari responden pada saat proses pengisian kuesioner

mengenai pajak restoran pada perjanjian kerja sama antara *e-commerce* dengan merchant bahwa :

“Jumlah biaya jasa dihitung berdasarkan besaran persentase dari penjualan bersih dan besaran persentase biaya jasa sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pengertian penjualan bersih adalah jumlah harga produk dalam transaksi yang tidak termasuk pajak restoran (termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pembangunan Satu atau Pajak Pertambahan Nilai) dan/atau restoran service charge” (Merchat Gofood, 2023)

Informasi diatas sejalan dengan hasil Penelitian oleh Gavilan et al. (2021) dan Setyadi & Sumarsono (2020) menunjukkan bahwa meskipun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh *e-commerce* dapat mempermudah perhitungan dan pembayaran pajak, hal ini tidak selalu menjamin peningkatan kepatuhan pajak. Faktor internal seperti kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak lebih berpengaruh dibandingkan hanya sistem pembayaran. Penjelasan dalam perjanjian kerjasama antara *e-commerce* dengan merchant menunjukan informasi yang kurang jelas.

Galuh (2020) menyoroti bahwa sistem pembayaran pajak otomatis yang tidak transparan dapat menghambat kepatuhan jika wajib pajak tidak memahami jenis pajak yang dibayarkan. Meskipun indikator kemudahan dan fasilitas pembayaran pajak otomatis dikategorikan positif dalam penelitian ini, tidak ada hubungan signifikan yang terdeteksi antara indikator tersebut dengan peningkatan kepatuhan pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi *e-commerce*, meskipun mempermudah proses transaksi, efektivitasnya dalam meningkatkan

kepatuhan pajak sangat bergantung pada transparansi dan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka.

Berdasarkan temuan empiris responden menunjukkan bahwa, meskipun *e-commerce* menawarkan manfaat dalam proses transaksi dan pembayaran pajak, masih terdapat kendala seperti biaya tambahan dan masalah teknis. Konsumen lebih memilih datang langsung ke restoran, dan adanya biaya tambahan untuk platform *e-commerce* menjadi alasan ketidakpuasan. Selain itu, masalah teknis seperti *error* sistem dan kebutuhan rekonsiliasi manual menyebabkan proses perpajakan tidak berjalan mulus. Meskipun *e-commerce* mempermudah akses data transaksi dan pembayaran pajak secara *real-time*, perbaikan sistem masih diperlukan agar proses lebih efisien dan efektif.

Responden juga mengakui pentingnya kepemilikan NPWPD sebagai bentuk tanggung jawab pajak, namun proses pendaftaran NPWPD secara online masih dianggap membingungkan. Dokumen yang perlu diunggah dianggap memberatkan, yang turut mempengaruhi kepatuhan pajak restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem *e-commerce* mempermudah pembayaran dan penghitungan pajak, beberapa pemilik usaha merasa terbebani oleh beban pajak yang dikenakan kepada konsumen, yang tidak memberikan nilai tambah dan mengurangi minat konsumen.

Dengan mempertimbangkan temuan, responden mengindikasikan bahwa meskipun fitur pemantauan transaksi secara *real-time* sangat membantu, masalah teknis seperti *maintenance* dan *error* sistem menyebabkan mereka harus melakukan pengecekan ulang secara manual. Hal ini menghambat efisiensi proses, yang menunjukkan bahwa meskipun teknologi *e-commerce* menawarkan kemudahan,

implementasi yang belum optimal dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan *New Public Service* dalam administrasi publik, di mana pemerintah perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan pelaku usaha melalui edukasi, dialog, dan peningkatan kapasitas sistem, agar tercipta sistem perpajakan digital yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

5.7.2. *Self assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses *self assessment system* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak restoran dalam konteks implementasi kebijakan *e-commerce* GoFood. Koefisien positif sebesar 0,322 mengindikasikan bahwa semakin baik pelaksanaan *self-assessment system*, semakin tinggi pula kepatuhan pajak restoran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setyadi & Sumarsono (2020), yang menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam proses *self-assessment* untuk mendorong kepatuhan pajak. Proses *self assessment* yang efektif memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara lebih akurat dan tepat waktu, yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak restoran yang terdaftar di platform GoFood.

Indikator dalam *self assessment system*, termasuk kesadaran akan kewajiban pajak, kemudahan pendaftaran NPWPD, dan kemudahan perhitungan serta pembayaran pajak, berkontribusi pada kepatuhan pajak. Wardani & Nurhayati (2019) mengemukakan bahwa kemudahan dalam proses *self assessment*, seperti pembuatan NPWPD dan perhitungan pajak, dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara positif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa

proses *self assessment* yang baik berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak restoran. Kesadaran dan kemudahan dalam proses tersebut memungkinkan wajib pajak untuk lebih konsisten dalam memenuhi kewajibannya, mendukung kepatuhan pajak yang lebih tinggi dalam ekosistem *e-commerce*.

Namun, meskipun pengaruh *self assessment system* signifikan, implementasinya harus disertai dengan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi wajib pajak. Seperti diungkapkan oleh Harbolt (2019), meskipun teknologi dan sistem administratif dapat mempermudah proses perpajakan, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana wajib pajak memahami dan memanfaatkan sistem tersebut dengan benar. Untuk memastikan bahwa *self assessment system* dapat secara optimal meningkatkan kepatuhan pajak, perlu ada upaya berkelanjutan untuk mengedukasi wajib pajak mengenai penggunaan sistem dan memastikan bahwa prosesnya sederhana serta tidak menimbulkan kebingungan.

Temuan empiris dari responden yang diuraikan menunjukkan bahwa meskipun NPWPD dianggap penting, beberapa responden merasa proses pembuatan dan pelaporannya rumit. Meskipun teknologi *e-commerce* seperti GoFood menawarkan kemudahan, tantangan terkait pemahaman dan penggunaan sistem *self assessment* masih perlu diatasi. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem *self assessment* yang baik berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak restoran, tetapi perlu dukungan edukasi dan pelatihan yang memadai untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pandangan Harbolt (2019) bahwa efektivitas sistem perpajakan sangat bergantung pada pemahaman dan pemanfaatan yang benar oleh wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan pendekatan *New Public Service* yang menekankan pentingnya peran aktif

pemerintah dalam memberikan edukasi, membangun kepercayaan, dan menjalin kolaborasi dengan wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan secara partisipatif dan akuntabel

5.7.3. Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengawasan pajak berbasis teknologi melalui platform *e-commerce* GoFood dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak restoran. Koefisien positif sebesar 0,524 mengindikasikan bahwa semakin baik dan efektif pengawasan pajak berbasis teknologi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak restoran. Temuan ini konsisten dengan studi Agbo & Nwadiolor (2020) yang menekankan bahwa teknologi meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Dengan memanfaatkan teknologi dalam pengawasan pajak, otoritas pajak dapat memantau kewajiban pajak dengan lebih akurat dan *real-time*, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan pajak pada restoran yang beroperasi melalui platform *e-commerce* seperti GoFood.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan pengawasan pajak berbasis teknologi mencakup kemudahan perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak yang terintegrasi dengan teknologi. Harbolt (2019) mengungkapkan bahwa teknologi mempermudah proses pendaftaran, perhitungan, dan pelaporan pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa fitur-fitur teknologi dalam sistem *e-commerce*, seperti portal pajak yang mudah diakses dan sistem pelaporan elektronik, berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak restoran. Teknologi yang

mempermudah proses perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan lebih efisien dan tepat waktu.

Namun, meskipun pengawasan pajak berbasis teknologi memiliki dampak signifikan, penting untuk memastikan bahwa teknologi tersebut diimplementasikan dengan baik dan didukung oleh kebijakan yang memadai. Pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi tetapi juga pada kualitas sistem dan kebijakan yang menyertainya. Teknologi harus diintegrasikan dengan kebijakan pengawasan yang ketat serta didukung oleh edukasi yang memadai untuk memastikan pemanfaatan yang optimal oleh semua pihak terkait. Oleh karena itu, pembaruan dan peningkatan teknologi pengawasan pajak serta pelatihan yang komprehensif bagi wajib pajak dan petugas pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh di Kota Semarang.

Berdasarkan temuan empiris dari tabel 4.13 dan Tabel 4.15, meskipun kepatuhan terhadap NPWPD dianggap penting oleh sebagian besar responden, beberapa dari mereka merasa proses pembuatan NPWPD sebagai beban tambahan yang merepotkan. Selain itu, meskipun kewajiban pajak restoran diakui, beberapa responden merasa bahwa beban pajak yang dikenakan tidak memberikan manfaat langsung yang signifikan bagi usaha mereka. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses administrasi dan komunikasi mengenai manfaat serta penerapan pengawasan pajak berbasis teknologi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor restoran berbasis *e-commerce*.

5.7.4. Pengawasan Pajak Restoran Berbasis Teknologi Memoderasi *E-Commerce* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pajak berbasis teknologi memiliki pengaruh moderasi yang signifikan, namun dengan arah yang negatif. Koefisien negatif sebesar -0,217 mengindikasikan bahwa meskipun pengawasan pajak berbasis teknologi efektif dalam memoderasi pengaruh *e-commerce* terhadap kepatuhan pajak, hal ini cenderung mengurangi dampak bahwa penerapan teknologi baru dalam perpajakan harus disertai dengan penyesuaian sistem dan pelatihan agar dapat berjalan efektif.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengukur bagaimana pengawasan pajak berbasis teknologi memengaruhi kepatuhan pajak melalui pengaruh *e-commerce*. Beberapa indikator utama meliputi tingkat integrasi sistem *e-commerce* dengan sistem perpajakan, kecepatan dan akurasi pelaporan pajak melalui *e-commerce*, serta transparansi transaksi. Menurut Li et al. (2020), untuk mencapai kepatuhan pajak yang optimal, teknologi pengawasan pajak harus mampu beradaptasi dengan berbagai platform *e-commerce* yang digunakan oleh wajib pajak, sehingga meminimalisir kesalahan dan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Namun, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif, penting untuk mempertimbangkan konteks spesifik di mana moderasi tersebut terjadi. Moderasi negatif ini tidak selalu mengindikasikan bahwa pengawasan pajak berbasis teknologi merugikan, tetapi mungkin menunjukkan bahwa ada aspek-aspek tertentu dari sistem teknologi yang perlu diperbaiki atau disesuaikan agar lebih selaras dengan praktik *e-commerce* yang ada. Oleh karena

itu, upaya untuk mengoptimalkan pengawasan pajak berbasis teknologi sebaiknya difokuskan pada peningkatan integrasi antara teknologi pengawasan dan sistem *e-commerce*, serta pelatihan yang memadai bagi pengguna teknologi ini. Dengan demikian, pengawasan pajak berbasis teknologi dapat lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak restoran di era digital.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa pengawasan berbasis teknologi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik platform *e-commerce* dapat menimbulkan kebingungan atau resistensi dari pelaku usaha, sehingga justru melemahkan pengaruh positif *e-commerce* terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menandakan bahwa integrasi sistem antara *e-commerce* dan sistem pengawasan harus dilakukan secara bertahap dan disertai dengan pelatihan serta pendampingan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengawasan yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga ramah pengguna, mudah dipahami, dan kompatibel dengan alur bisnis pelaku usaha restoran berbasis *e-commerce*. Dengan demikian, dampak negatif dari moderasi ini dapat ditekan, dan kepatuhan pajak tetap dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

5.7.5. Pengawasan Pajak Berbasis Teknologi Memoderasi *Self assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan pajak berbasis teknologi memiliki potensi untuk memoderasi hubungan antara *self-assessment system* dan kepatuhan pajak, pengaruh tersebut tidak cukup kuat atau signifikan. Koefisien jalur yang positif sebesar 0,114 menunjukkan adanya arah moderasi yang diharapkan, namun ketidakmampuan untuk mencapai signifikansi statistik menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam pengawasan pajak

mungkin belum optimal atau mungkin terdapat faktor-faktor lain yang menghambat efektivitas moderasi ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zhang & Li (2019), yang menyatakan bahwa keberhasilan moderasi teknologi dalam sistem perpajakan sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan adaptasi oleh wajib pajak.

Analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor bisa mempengaruhi efektivitas moderasi pengawasan pajak berbasis teknologi. Misalnya, tingkat adopsi teknologi oleh restoran mungkin tidak merata, atau adanya kompleksitas dalam integrasi antara *sistem self assessment* dengan teknologi pengawasan yang ada. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bagaimana teknologi mendukung validasi dan pelaporan *self assessment* secara *real-time*, namun jika infrastruktur teknologi belum memadai atau pengguna belum sepenuhnya terlatih, maka dampak moderasi yang diharapkan mungkin tidak tercapai. Menurut Wang et al. (2020), untuk memperkuat moderasi ini, diperlukan pengembangan lebih lanjut dari sistem teknologi yang lebih *user-friendly* dan pelatihan yang memadai bagi wajib pajak dalam penggunaan teknologi tersebut.

Dengan demikian, hasil ini menyatakan bahwa pentingnya evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam penerapan teknologi untuk pengawasan pajak. Meski pengawasan pajak berbasis teknologi diharapkan dapat memperkuat efektivitas *self assessment system*, hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa strategi implementasi harus lebih difokuskan pada penguatan infrastruktur teknologi, penyesuaian sistem yang lebih terintegrasi, serta peningkatan kapasitas wajib pajak dalam penggunaan teknologi tersebut. Hanya dengan pendekatan yang lebih holistik, teknologi pengawasan pajak dapat benar-benar berperan dalam memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan pajak restoran

secara signifikan.

5.8. Analisis dari Sudut Pandang Administrasi Publik

Pendekatan administrasi publik, khususnya dalam kerangka New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2003), memberikan perspektif penting dalam memahami dinamika kepatuhan pajak restoran berbasis *e-commerce*. Paradigma ini menekankan bahwa pemerintah bukan hanya entitas yang mengatur (*steering*), tetapi pelayan publik yang berperan dalam membangun kepercayaan, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat (*serving*). Dalam konteks penelitian ini, paradigma NPS menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan rendahnya kepatuhan pajak pada restoran GoFood.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pajak berbasis teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini dapat dijelaskan dalam kerangka akuntabilitas dan transparansi publik, dua prinsip utama dalam administrasi publik modern. Ketika pemerintah menggunakan teknologi untuk meningkatkan keterbukaan sistem pembayaran dan pelaporan pajak, hal tersebut bukan semata-mata sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai cara membangun *government trust* (Kirchler et al., 2008). Kepercayaan ini adalah prasyarat penting dalam menciptakan *voluntary tax compliance*, sebagaimana dijelaskan dalam model *slippery slope*.

Kedua, *self assessment system* yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dapat dimaknai sebagai bentuk *citizen empowerment*, di mana pemerintah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada warga negara (dalam hal ini pelaku usaha) untuk memenuhi kewajibannya secara mandiri. Dalam kerangka administrasi publik, pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari model birokratis

ke model partisipatif, yang lebih menekankan pada otonomi warga negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Ketiga, ketidakefektifan sistem *e-commerce* dalam meningkatkan kepatuhan pajak mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan publik dan inovasi teknologi yang diterapkan oleh sektor swasta. Dalam konteks administrasi publik, kolaborasi lintas sektor dipandang sebagai salah satu solusi yang relevan, sebagaimana dijelaskan dalam teori *Collaborative Governance*. Penelitian ini memformulasikan determinan model kepatuhan pajak restoran berbasis *e-commerce GoFood* yang melibatkan peran aktif pemerintah, pelaku usaha (restoran), dan pemilik platform digital dalam suatu kerangka tata kelola kolaboratif yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial serta perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, pendekatan administrasi publik dalam penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman normatif, tetapi juga mendorong transformasi institusional dalam pengelolaan perpajakan lokal. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi pengumpul pajak, tetapi juga fasilitator dan mitra aktif dalam membangun sistem perpajakan yang adil, efisien, dan responsif terhadap era digital.

5.9. Temuan Empirik *Novelty*

Novelty penelitian ini terdapat dalam konteks topik, kerangka model, metode penelitian dan lokus penelitian. Kebaruan dalam penelitian ini dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyoroti pengaruh moderasi pengawasan pajak berbasis teknologi terhadap hubungan antara sistem *self assessment* dan kepatuhan pajak restoran, yang belum pernah dibahas dalam konteks sebelumnya.

Khususnya, kajian ini mengisi kekosongan dalam studi mengenai pajak restoran di Kota Semarang dengan memfokuskan pada bagaimana teknologi pengawasan memoderasi hubungan ini.

2. Model penelitian ini menawarkan integrasi antara pengaruh *e-commerce* dan pengawasan pajak berbasis teknologi terhadap kepatuhan pajak restoran. Pendekatan kuantitatif yang digunakan menggabungkan variabel-variabel yang belum pernah digunakan secara bersamaan dalam penelitian terdahulu, memberikan perspektif baru dalam studi kepatuhan pajak.
3. Penelitian ini memodifikasi dan mengembangkan indikator-indikator dalam pengukuran variabel pengawasan pajak berbasis teknologi. Hal ini menghasilkan instrumen penelitian yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, membedakannya dari penelitian sebelumnya.
4. Penelitian ini memberikan perhatian khusus pada konteks lokal Kota Semarang, yang memiliki karakteristik unik dalam penerapan kebijakan pajak restoran berbasis teknologi. Fokus ini membuka peluang untuk memahami dan mengatasi tantangan spesifik di daerah tersebut, sesuatu yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu mengenai kebijakan pajak berbasis teknologi.
5. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan *New Public Service* dalam pengelolaan pajak berbasis teknologi, yang menekankan kolaborasi aktif antara pemerintah dan wajib pajak. Hal ini menjadi aspek kebaruan yang memperkuat nilai administrasi publik dalam konteks pajak restoran berbasis e-commerce, sekaligus menambah perspektif baru pada model

kepatuhan pajak yang dikembangkan.

5.10. Manfaat *Novelty*

Manfaat dari temuan-temuan baru ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memperkaya teori perpajakan dengan fokus pada moderasi pengawasan pajak berbasis teknologi dalam konteks *self assessment system* dan *e-commerce*. Hasil penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai peran teknologi dalam memoderasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, sehingga menambah literatur yang ada dalam bidang ini.
2. Temuan empiris dari penelitian ini memberikan bukti bahwa pengawasan pajak berbasis teknologi secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak restoran. Dengan adanya bukti ini, pemerintah daerah, khususnya di Kota Semarang, dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan terarah, serta mempertimbangkan penerapan teknologi ini secara lebih luas.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran. Temuan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif, serta mendorong penerapan sistem *self assessment* pada sektor-sektor lain yang relevan.
4. Kebaruan dalam penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi hubungan antara teknologi, *e-commerce*, dan kepatuhan pajak. Temuan ini membuka peluang untuk studi lanjutan yang dapat menguji model penelitian ini di berbagai konteks atau memperdalam analisis dengan menambahkan

variabel-variabel baru.

5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak berbasis teknologi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Manfaat ini memberikan implikasi langsung pada peningkatan kualitas layanan pajak, di mana integrasi teknologi dalam proses pengawasan pajak dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal dan efisien.

5.11. Kontribusi Orisinalitas Disertasi

Orisinalitas dari disertasi ini dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek berikut:

1. Pengembangan Model Baru

Disertasi ini mengusulkan dan menguji sebuah model teoritis baru yang mengkaji pengaruh moderasi pengawasan pajak berbasis teknologi terhadap hubungan antara *self assessment system* dan *e-commerce* dengan kepatuhan pajak restoran. Model ini memperkenalkan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem perpajakan daerah, sehingga memperkaya kajian ilmiah di bidang perpajakan dengan sudut pandang digitalisasi.

2. Dampak Digitalisasi dalam Sistem Pajak Daerah

Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana digitalisasi, melalui platform *e-commerce* dan teknologi pengawasan pajak, memengaruhi sistem perpajakan di tingkat daerah. Digitalisasi tidak hanya berdampak pada wajib pajak sebagai pelaku usaha, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan dalam hal data pajak, efektivitas pemungutan, transparansi pelaporan, dan akurasi pengawasan pemerintah daerah.

3. Studi Empiris *e-commerce* dan Restoran

Disertasi ini merupakan studi yang meneliti pengaruh *e-commerce* terhadap kepatuhan pajak restoran, dengan fokus pada penggunaan GoFood di Kota Semarang. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan pajak berbasis teknologi sebagai respon terhadap meningkatnya transaksi digital di sektor jasa makanan, yang selama ini sulit dijangkau oleh sistem pajak manual.

4. Pendekatan Metodologis dengan SEM

Disertasi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik *Structural Equation Modelling* (SEM) untuk menguji hubungan antar variabel, termasuk pengaruh moderasi.

5. Fokus pada Konteks Lokal Kota Semarang

Pemilihan Kota Semarang sebagai lokasi penelitian memberikan nilai tambah orisinalitas karena belum banyak penelitian yang mendalami dinamika perpajakan restoran berbasis teknologi di tingkat daerah. Hal ini memberikan gambaran yang spesifik dan relevan mengenai pelaksanaan kebijakan perpajakan digital di tingkat lokal serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

6. Pengembangan Instrumen Penelitian

Disertasi ini mengembangkan instrumen penelitian yang mengukur variabel pengawasan pajak berbasis teknologi, *self assessment system*, dan *e-commerce* terhadap kepatuhan pajak restoran. Instrumen ini telah diuji validitasnya sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.